

**PENGARUH INKLUSI KEUANGAN SYARIAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
TAHUN 2015 – 2017**

SKRIPSI

Disusun oleh :

**ANNISA HIDAYANTI
115020500111026**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2015-2017"

Yang disusun oleh :

Nama : Annisa Hidayanti
NIM : 115020500111026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **17 Desember 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Aminnullah Achmad Muttaqin, M.Sc. Fin.
NIP. 2016078711241001
(Dosen Pembimbing)



2. Anas Budiharjo, S.H.I., M.A.
NIP. 2016078505091001
(Dosen Penguji I)



3. Aji Purba Trapsila, SE.I., ME.I..
NIP. 198401232015041002
(Dosen Penguji II)



Malang,
Ketua Program Studi
Ekonomi Islam,



Arief Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
NIP. 19700922 1995121 002

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

**“Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia 2015-2017”**

Yang disusun oleh

Nama	Annisa Hidayanti
NIM	115020500111026
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan	S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	Ekonomi Islam

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Malang, 6 November 2018
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ekonomi Islam,

Dosen Pembimbing,



Arief Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
NIP. 19700922 1995121 002

Aminnullah Achmad Muttaqin, M.Sc. Fin.
NIP. 2016078711241001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama **Annisa Hidayanti**
Tempat, tanggal lahir **Jakarta, 19 Mei 1994**
NIM **115020500111026**
Jurusan **S1-Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi **Ekonomi Islam**
Alamat **Jalan Cipinang Kebembem No.1 Pulogadung, Jakarta Timur**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul

**Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
tahun 2015-2017**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Aminnullah Achmad Muttaqin, M.Sc. Fin.
NIP 2016078711241001

Malang, 6 November 2018

Yang membuat pernyataan,



Annisa Hidayanti
NIM.115020500111026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi **Islam**



Arief Hoetoro, SE., MT., Ph.D.
NIP 19700922 1995121 002

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Annisa Hidayanti
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Mei 1994
NIM : 115020500111026
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Islam
Alamat : Jl. Cipinang Kebembem No.1 Jakarta Timur

Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi III Jakarta Lulus Tahun 1998-2000
2. SD Negeri Percontohan IKIP Rawamangun Jakarta Lulus Tahun 2000-2005
3. SMP Negeri 92 Jakarta Lulus Tahun 2005-2008
4. SMA Negeri 54 Jakarta Lulus Tahun 2008-2011
5. S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga penulis dapat mengerjakan Skripsi dengan baik dan lancar yang berjudul **“PENGARUH INKLUSI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2015-2017”**. Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Prodam Studi Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, berkat dukungan beliau-beliau skripsi ini dapat diselesaikan di antaranya:

1. Bapak Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Dra. Multifiah, MS. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk memberikan kesempatan, masukan, dan bimbingan dalam penyusunan laporan KKN-P penulis. Sehingga penulis dapat melanjutkan pengerjaan dan penuntasan Skripsi penulis.
4. Bapak Aminnullah Achmad Muttaqin, M.Sc. Fin. Selaku dosen pembimbing penulis. Banyak terima kasih penulis ucapkan untuk beliau, karena penulis dapat melanjutkan penuntasan tugas akhir di masa-masa yang kritis.
5. Bapak Prof. Munawar, Ph.D. selaku dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih atas

- bantuan dan dukungan dari beliau. Masukan-masukan dari beliau yang membantu penulis dalam pembetulan tema awal Skripsi penulis.
6. Kedua orang tua saya yang telah senantiasa memberikan dukungan selama masa pengerjaan tugas akhir. Berkat kedua orang tua saya dengan rahmat Allah SWT, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar mendapatkan ilmu di jenjang Perguruan Tinggi. Terutama untuk ayah penulis, karena beliau selalu mendukung dan memberi semangat untuk penulis walaupun berbagai macam masalah dan cobaan yang dihadapi oleh penulis.
 7. Teman-teman saya yang selalu memberi dukungan di sela-sela masa pengerjaan tugas akhir. Terima kasih telah banyak memberikan saran dan dukungan agar saya dapat percaya diri untuk menuntaskan tugas saya sebagai mahasiswa.
 8. Ruang Belajar Aqil, tempat yang menjadi wadah pembelajaran penulis untuk belajar kembali tentang penelitian. Terima kasih atas bantuan dan dukungan mentor dan teman-teman relawan untuk penulis yang tiada hentinya.
 9. Serta pihak-pihak lain yang belum bisa penulis sebutkan kesemuanya.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. Karenanya, kritik dan saran dari pembaca diharapkan dapat menjadi masukan untuk penulis. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 18 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Kerangka Teori	10
2.2. Kerangka Pikir	20
2.2.1. Inklusi Keuangan	20
2.2.2. Keuangan Syariah	24
a. Perbankan Syariah	27
i. Dana Pihak Ketiga Syariah	29
ii. Pembiayaan Syariah	33
iii. Kantor Layanan Cabang Bank Syariah	36

b. Pasar Modal Syariah	36
c. Industri Keuangan Non-Bank	36
2.2.3. Inklusi Keuangan Syariah	36
2.3. Pertumbuhan Ekonomi	37
2.3.1. Produk Domestik Bruto per Kapita	38
2.4. Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan	39
2.5. Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi	39
2.6. Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi	40
2.7 Hipotesis	41
2.8 Konsep Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Pendekatan Penelitian	42
3.2. Tempat dan waktu Penelitian	42
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	43
3.4. Populasi dan Sampel	43
3.5. Metode Pengumpulan Data	44
3.6. Metode Analisis	44
3.6.1. Indeks Inklusi Keuangan	44
a. Dimensi Penetrasi Perbankan Syariah (D1)	46
b. Dimensi Availabilitas Syariah (D2)	47
c. Dimensi Penggunaan Syariah (D3)	47
3.6.2. Analisis Regresi Linear Sederhana	50
a. Uji Asumsi Klasik	50
i. Uji Normalitas	51
ii. Uji Autokorelasi	51
iii. Uji Multikolinearitas	51

iv. Uji Heterokedasitas	51
b. Uji Regresi Linear Sederhana	52
c. Uji Hipotesis	52
i. Uji F	52
ii. Uji T	52
iii. Koefisien Determinan (R^2)	52
d. Model Penelitian	53
3.7. Kerangka Berpikir	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Hasil Penelitian	55
4.1.1. Dimensi Sektor Keuangan Syariah	55
a. Dimensi Penetrasi Perbankan Syariah (D1)	56
b. Dimensi Availabilitas Syariah (D2)	57
c. Dimensi Penggunaan Syariah (D3)	59
4.1.2. Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IICS)	60
4.1.3. Analisis Pengaruh Indeks Inklusi Keuangan Syariah terhadap PDB per kapita	63
a. Uji Asumsi Klasik	63
i. Uji Normalitas	63
ii. Uji Autokorelasi	64
iii. Uji Multikolinearitas	64
iv. Uji Heterokedasitas	65
b. Uji Regresi Linear Sederhana	65
4.2. Pengujian Hipotesis	67
a. Uji F	67

b. Uji T	67
c. Koefisien Determinan (R^2)	68
4.3. Pembahasan	68
4.3.1. Indeks Inklusi Keuangan Syariah	68
4.3.2. Pengaruh Indeks Inklusi Keuangan terhadap PDB per kapita	70

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 <i>Market share</i> Perbankan Syariah tahun 2016	4
Grafik 1.2 <i>Indonesia Islamic Finance Country Index</i> (IFCI)	5
Grafik 1.3 <i>Top Countries in Islamic Banking Assets</i> (2016)	6
Grafik 4.1 Dimensi Penetrasi Perbankan Syariah (D1)	56
Grafik 4.2 Dimensi Availabilitas Syariah (D2)	58
Grafik 4.3 Dimensi Penggunaan Syariah (D3)	59
Grafik 4.4 Indeks Inklusi Keuangan Syariah Indonesia 2015-2017	63



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategori nilai Indeks Inklusi Keuangan	50
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Dimensi Sektor Keuangan Syariah	55
Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Dimensi Sektor Keuangan Syariah	56
Tabel 4.3 Tabel Hasil Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS)	60
Tabel 4.4 Deskripsi Statistik Indeks Dimensi Keuangan Syariah	62



Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2015-2017

Annisa Hidayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: annisahidayanti94@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, untuk mengukur inklusi keuangan syariah digunakan metode Indeks Inklusi Keuangan (Sarma, 2012) dengan 3 dimensi sektor perbankan syariah, kemudian Analisis Regresi Linear Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh indeks inklusi keuangan syariah terhadap PDB per kapita. Rentang waktu amatan untuk penelitian ini selama periode 36 bulan tahun 2015-2017. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia termasuk dalam kategori menengah dan berpengaruh positif terhadap PDB per kapita Indonesia. Dimensi penetrasi perbankan syariah memiliki proporsi kontribusi yang terbesar diikuti dengan dimensi penggunaan syariah dan dimensi availabilitas syariah dalam inklusi keuangan syariah Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jasa layanan keuangan syariah di Indonesia belum optimum digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Inklusi Keuangan Syariah, Indeks Inklusi Keuangan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDB per kapita.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Tahun 2012, Strategi Nasional Keuangan Inklusif dikeluarkan atas kerjasama Bank Indonesia dengan Sekretariat Wakil Presiden - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan (Bank Indonesia, 2014), yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). SNKI menargetkan Inklusi Keuangan yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir tahun 2019. Selain itu, Inklusi Keuangan juga merupakan komponen penting dalam proses Inklusi Sosial dan Inklusi Ekonomi yang berperan mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan oleh Pemerintah mencapai 8% pada tahun 2019 (SNKI, 2016 & BAPPENAS, 2014).

Tetapi, tingkat Inklusi Keuangan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Indonesia telah mencapai tingkat Inklusi Keuangan sebesar 67,82% dan Inklusi Keuangan Syariah masih sebesar 11,06% (*Revisit SNLKI*, 2016). Di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), berbagai indikator Inklusi Keuangan cenderung lemah (Naceur et al, 2015).

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2016). Sedangkan SNKI (2016) mendefinisikan Inklusi Keuangan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai

layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Inklusi Keuangan awalnya mengacu pada pemberian jasa keuangan dengan biaya terjangkau untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Selama dekade terakhir, konsep Inklusi Keuangan telah berkembang menjadi empat dimensi, yaitu akses pembiayaan yang mudah untuk semua rumah tangga dan bisnis, lembaga sehat yang dibimbing dengan regulasi yang bijaksana dan dipantau, lembaga keuangan yang memiliki keuangan dan kelembagaan yang berkelanjutan, dan kompetisi antar para penyedia jasa untuk memberi solusi alternatif kepada pengguna jasa (Mohieldin et al., 2011)

SNKI (OJK, 2012) memiliki enam tujuan Inklusi Keuangan yaitu; (1) Menjadikan Strategi Inklusi Keuangan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan, (2) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan, (4) Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan, (5) Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan nonbank, (6) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

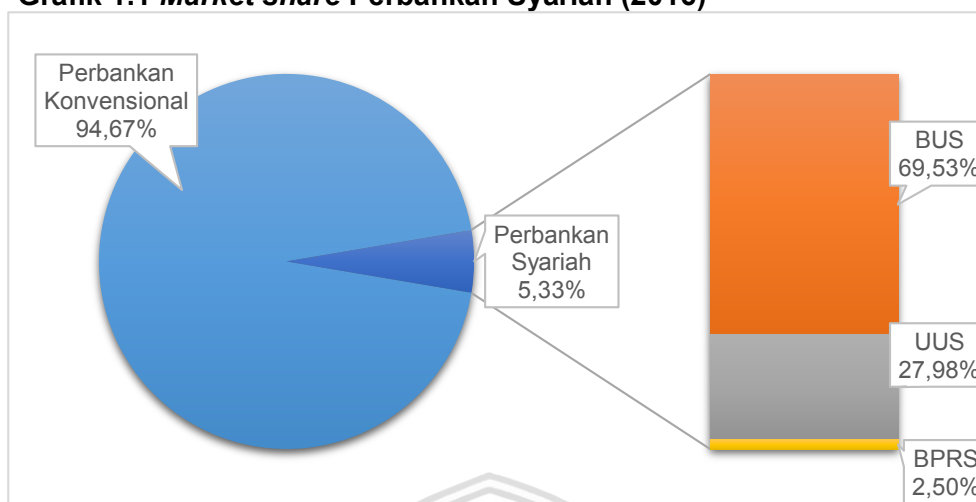
Terdapat banyak tantangan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia seperti bentuk geografi kepulauan Indonesia, uang tunai masih menjadi alat tukar transaksi yang diminati, tingkat literasi keuangan di angka 29,7%, bank masih mendominasi Inklusi Keuangan, dimana hasil survei *Financial Inclusion Insights* (FII) menyebutkan sebanyak 93% penduduk dewasa yang terinklusi keuangannya memiliki tabungan atau rekening di bank, dan lain-lain (*Finclusion Insights*, 2016 dan OJK, 2016). Di Lapangan, perkembangan Inklusi Keuangan

mayoritas penggeraknya adalah Lembaga Keuangan Formal (*Finclusion Insight*, 2016) yang mulai menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank dan tidak memiliki rekening sebelumnya.

Beberapa bentuk dari kebijakan inklusi keuangan di Indonesia berupa pendalaman layanan keuangan seperti peningkatan akses (*branchless banking*, Layanan Keuangan Digital (LKD), pendirian kantor cabang bank di daerah terpencil, dsb), produk yang terjangkau untuk masyarakat kecil (kredit/pembiayaan mikro dan Tabungan dengan biaya administrasi yang rendah (TabunganKu), Edukasi Keuangan untuk semua lapisan masyarakat guna meningkatkan literasi keuangan, dan kebijakan atau peraturan yang mengatur perlindungan konsumen (*bi.go.id*).

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2012) ketersediaan jasa keuangan belum tentu dapat disamakan dengan inklusi keuangan karena adanya kemungkinan orang-orang yang tidak memakai jasa keuangan dengan alasan religius atau budaya, walaupun mereka memiliki akses dan mampu secara finansial untuk menggunakan jasa keuangan. Tetapi di Indonesia, Demirguc et al. (2013) menemukan bahwa hal tersebut berbeda, karena banyak masyarakat muslim yang memiliki tabungan dan pinjaman di bank-bank konvensional.

Dalam *Islamic Finance Report Prospect for Exponential Growth – Indonesia* mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) H.E Agus D.W. Martowardojo menyatakan “Sistem Keuangan Syariah di Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan syariah walaupun pasar modal syariah menunjukkan masa depan menjanjikan yang ditopang oleh Sukuk keluaran pemerintah”. Selain itu Dr, Mulya E. Siregar selaku mantan Deputi Komisioner di OJK menyatakan “Inisiatif pendirian Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia kebanyakan berasal dari komunitas” (Thomson-Reuters, 2015).

Grafik 1.1 Market share Perbankan Syariah (2016)

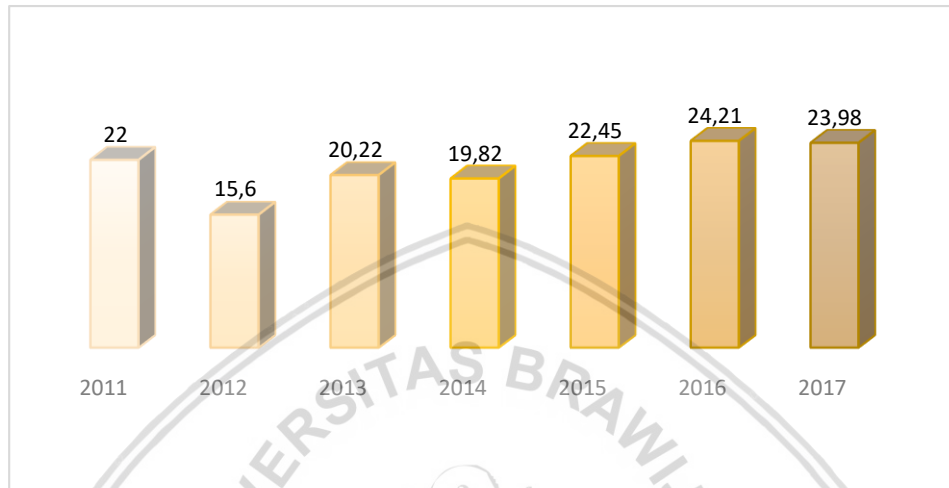
Sumber: Strategi Nasional Literasi & Keuangan Inklusif *Revisi* 2017, OJK

Indonesia memiliki potensi yang besar dibidang Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah dikarenakan besarnya populasi penduduk muslim (estimasi PEW Research Center tahun 2010, 88% penduduk Indonesia (sebanyak 209.120.000 jiwa) merupakan populasi muslim terbanyak di dunia, yaitu sebesar 13,1% seluruh populasi muslim di dunia), dan juga faktor-faktor lainnya. Meskipun bagi beberapa kalangan, Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah merupakan fokus yang besar dan keberadaannya sudah terlihat, Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah masih memilki kesan seperti industri kecil di negaranya. Rata-rata nilai *Islamic Finance Country Index* (ISFC) di tingkat dunia, tidak meningkat secara signifikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Hal ini berarti, pada tingkat dunia, Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah masih belum dikenal sepenuhnya (Edbiz Consulting, 2016)

Indonesia, yang termasuk dalam negara yang memiliki populasi penduduk muslim tertinggi, sektor keuangan syariah dan perbankan syariahnya berkembang lebih komprehensif dibandingkan dengan negara-negara pemain besar di wilayah Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam 13 negara yang berperan signifikan di industri jasa keuangan syariah dunia. Ranking ISFCI

mengimplikasikan negara dengan populasi penduduk muslim yang besar adalah garis depan pertumbuhan Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah di masa depan (Edbiz Consulting, 2017).

Grafik 1.2 Indonesia Islamic Finance Country Index (IFCI)



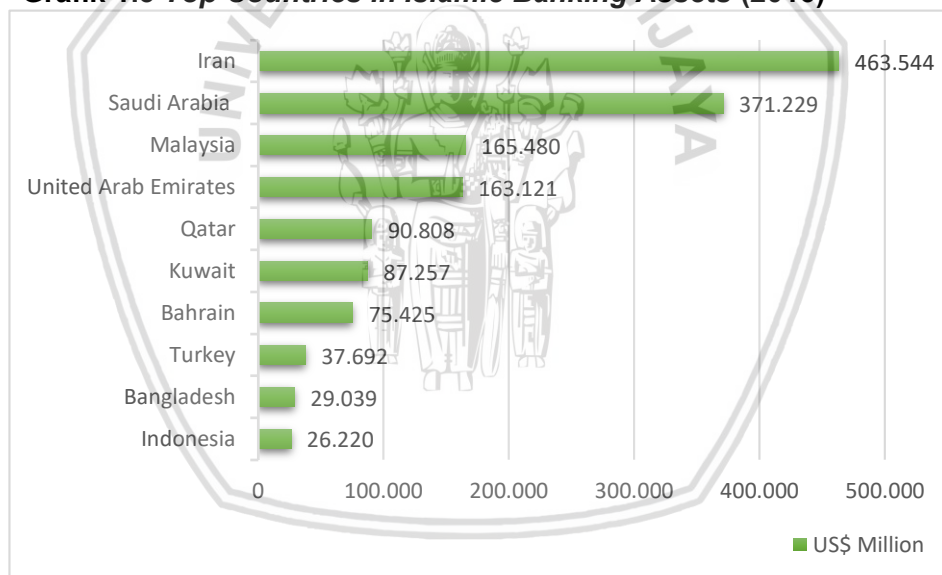
Sumber: Global Islamic Finance Report, Edbiz Consulting

Industri Perbankan Syariah akan tumbuh dengan lambat karena sifatnya yang terpusat dan kinerja ekonomi masing-masing negara yang rendah, terkecuali pasar sukuk (S&P Global Ratings, 2018). Penetrasi Bank dan *market share* Perbankan Syariah rendah di Indonesia walaupun memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia (Mckinsey & Company, 2018). Hasil survei Mckinsey Indonesia (2017) menemukan fenomena bahwa nasabah bank saat ini lebih menghargai nilai kepraktisan dan nilai kepercayaan terhadap bank daripada ketaatan pada nilai-nilai syariah ketika memilih bank.

OJK pertama kali melakukan survei untuk mengukur tingkat inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan syariah di provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2016. Didapatkan hasil pengukuran indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11,1% yang menunjukkan dari 100 penduduk, hanya 11 orang yang memakai jasa keuangan syariah dan untuk indeks literasi keuangan syariah mendapatkan hasil sebesar 8,1% yang berarti dari 100 penduduk, 8 orang yang

mengetahui tentang keuangan syariah di Indonesia. Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang lebih tinggi dibandingkan Indeks Literasi Keuangan Syariah menunjukkan bahwa masyarakat sudah menggunakan produk keuangan syariah walaupun belum memahami secara komprehensif tentang fitur produk, kemanfaatan, serta risiko produk dan jasa keuangan syariah (OJK, 2017) Sama seperti hasil penelitian oleh Demirgüç, Klapper, & Randall (2013) menemukan sedikitnya penggunaan produk-produk perbankan syariah di 5 negara Afrika Utara dan Timur Tengah, walaupun ditemukan bukti hipotesis preferensi produk-produk syariah di tengah keberagaman responden dan produk-produk syariah tersebut memiliki biaya administrasi yang lebih besar.

Grafik 1.3 Top Countries in Islamic Banking Assets (2016)



Sumber: Islamic Finance Development Report 2017. ICD-Thomson Reuters.

Aset yang berasal dari lembaga keuangan syariah dunia tidak mencapai 1% dari total aset keuangan global. Sebagian besar masyarakat muslim yang terinklusi keuangannya menggunakan produk dan layanan perbankan konvensional. Karena itu, Perbankan Syariah yang kini akses fisiknya (kantor layanan) tumbuh pesat di negara-negara anggota Organisasi Negara Islam (OKI)

menjadi sebuah kesempatan yang efektif untuk menuju Inklusi Keuangan Syariah (Naceur et al, 2015).

Iqbal & Mirakhor (2012) dan Mohieldin et al. (2011) berpendapat, terdapat pembahasan tentang inklusi keuangan dalam keuangan syariah yaitu; pembagian risiko dan pendistribusian kekayaan melalui *sadaqah*, *zakat*, *waqaf*, dan *qardh*.

Berbagai penelitian (Lebdaoui & Wild, 2016), (Yusof & Bahlous, 2013) dan (Abduh & Omar, 2012) telah menemukan Perbankan Islami atau yang umum disebut Perbankan Syariah di Indonesia, memiliki hubungan yang positif dengan Pertumbuhan Ekonomi suatu negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Iqbal & Mirakhor (2012) memaparkan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perkembangan keuangan dan akses keuangan yang ditingkatkan – yang juga disebut sebagai inklusi keuangan, di dalam sebuah negara memiliki kemungkinan tidak hanya sebagai penggerak utama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dimana pertumbuhan ekonomi beserta perkembangan ekonomi dan keadilan sosial, merupakan unsur dasar sistem ekonomi islam.

Rostow dalam Todaro & Smith (2003:132) memiliki pendapat, langkah utama atau kunci untuk memacu Pertumbuhan Ekonomi dan proses Pembangunan Ekonomi adalah peningkatan total tabungan nasional dan investasi. Begitu juga menurut Mankiw, et al. (2007:47) meningkatkan nilai tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Dalam jangka panjang, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula tingkat produktivitas dan pendapatan (2007:49).

Dari perspektif makroekonomi, eksklusi keuangan mengurangi kapasitas tabungan atau simpanan dan investasi agregat, yang dimana akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Solo, 2008).

Menurut King dan Levine (1993) pendalaman sistem keuangan suatu negara sebesar 1% dapat menaikkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar $\sim 0,03\%$. Sistem Keuangan yang lebih baik akan menstimulasi pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan output per kapita yang lebih cepat dengan membiayai sumber daya masyarakat ke usaha peningkatan produktivitas yang menjanjikan.

Lenka dan Sharma (2017) menemukan bahwa Inklusi Keuangan di India berdampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi baik jangka panjang maupun jangka pendek dan memiliki hubungan yang searah. Hasil penelitian Kim, Yu, dan Hassan (2017) juga menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang jelas diantara Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di 55 negara anggota OKI dan tingkat Inklusi Keuangan merupakan faktor penting dalam Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Okoye et al. (2017), menemukan bahwa Inklusi Keuangan tidak mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria, tetapi mendukung penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan temuan-temuan di atas, Inklusi Keuangan memiliki hubungan dan pengaruh yang berbeda-beda dengan Pertumbuhan Ekonomi di tiap negara dan periode.

Dikarenakan terbatasnya data statistik keuangan syariah di Indonesia, peneliti menetapkan batasan penelitian untuk mengukur tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui data perbankan syariah di Indonesia. Sarma (2012) dalam penelitiannya mempertimbangkan inklusi perbankan sebagai analogi dari inklusi keuangan. Karena bank merupakan gerbang awal untuk menggunakan

jasa keuangan dasar.

Didasarkan pada hal yang disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada periode sebelum dan setelah terbitnya Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016 mengenai Strategi Keuangan Inklusif Indonesia (SNKI), yaitu dari periode bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2017.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2015 – 2017?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2015 – 2017.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan penelitian berikutnya, terutama pada bidang Inklusi Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi.

2) Manfaat Praktis

Hasil Penelitian dapat menambah wawasan seberapa besar ukuran Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia dan dapat menjadi pertimbangan para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan Inklusi Keuangan Syariah dalam rangka mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

BAB II


KAJIAN PUSTAKA

2.1 KERANGKA TEORI

No.	Judul dan Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness</i> Mandira Sarma (2012)	Kuantitatif Deskriptif <i>Index of Financial Inclusion</i> (Sarma, 2008)	Inklusi Keuangan dan tingkat pendapatan cenderung bergerak ke arah yang sama, walaupun di beberapa negara terdapat pengecualian.
2.	<i>Index of Financial Inclusion</i> Mandira Sarma (2008)	Kuantitatif Deskriptif <i>Index of Financial Inclusion</i> (Sarma, 2008)	Indeks inklusi keuangan dapat digunakan untuk mengkomparasikan tingkat inklusi keuangan di perekonomian yang berbeda dan melihat progress inklusi keuangan tersebut seiring waktu. Indeks ini dapat digunakan peneliti-peneliti berikutnya untuk meneliti tentang hubungan Inklusi Keuangan dengan Perkembangan Ekonomi. Hasil penelitian untuk menggambarkan

			<p>penggunaan IIK dengan data makro 100 negara tahun 2004, menunjukan mayoritas negara yang diteliti memiliki tingkat inklusi keuangan yang rendah.</p>
3.	<p><i>Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia</i></p> <p>Azwar Iskandar Umar (2017)</p>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p><i>-Index of Financial Inclusion</i> (Sarma, 2012)</p> <p><i>-Product Moment Coefficient of Correlation</i> (Gupta et al.,2014)</p>	<p>Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia termasuk kategori rendah.</p> <p>Inklusi keuangan syariah di Indonesia ditentukan oleh dimensi Availabilitas dan penggunaan. Temuan ini bermakna bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal, khususnya, sebagai sumber keuangan dan pembiayaan utama. Indeks Inklusi Keuangan Syariah dan Indeks Pertumbuhan Manusia (HDI) memiliki hubungan yang positif dan signifikan satu sama lain.</p>
4.	<p>Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan</p>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p>	<p>Terdapat hubungan positif antara Inklusi Keuangan</p>

	<p>Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia</p> <p>I Made Sanjaya & Nursechafia (2016)</p>	<p><i>-Index of Financial Inclusion</i> (Sarma, 2012)</p> <p><i>-Index of Inclusive Growth</i> (Ali & Son, 2007 & Anard, et al, 2013)</p>	<p>dengan Pertumbuhan Inklusif di Indonesia. Inklusi Keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan penggunaan memiliki proporsi yang kecil, yang berarti masyarakat Indonesia kurang optimal dalam menggunakan jasa keuangan formal.</p>
5.	<p><i>Computation of Financial Inclusion Index for India</i></p> <p>Rajani Gupte, Bhama Venkataramani, & Deepa Gupta (2012)</p>	<p>Kuantitatif</p> <p><i>Index of Financial Inclusion</i> (Sarma, 2008) & (Arora, 2010)</p>	<p>Tingkat indeks inklusi keuangan India dari tahun 2008 hingga tahun 2009 meningkat dan termasuk kategori inklusifitas medium. Penelitian ini menggunakan 4 dimensi yaitu <i>outreach</i> (penetrasi dan aksesibilitas), penggunaan, kemudahan bertransaksi, dan biaya transaksi. Karena menggunakan menggunakan berbagai variabel dalam dimensi inklusi keuangan,</p>

			hasil indeks yang didapat lebih menyeluruh dibandingkan ketika memakai dimensi yang digunakan dalam penelitian Sarma (2008) sebelumnya.
6.	<p><i>Determinants of Financial Inclusion: An Empirical Study On the Inter-State Variations in India.</i></p> <p>Natarajan Chitara & Dr. Murugesan Selvam (2013)</p>	<p>Kuantitatif</p> <p><i>Index of Financial Inclusion</i> (Sarma, 2008)</p> 	<p>Sebanyak 20 wilayah di India yang diteliti memiliki tingkat inklusi keuangan yang beragam. Terdapat 2 wilayah dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi, 4 wilayah termasuk kedalam kategori medium. 14 wilayah lainnya termasuk kategori tingkat inklusi keuangan yang rendah. Faktor sosio-ekonomi (Pendapatan, Literasi, dan Populasi), faktor infrastruktur, dan faktor perbankan (penetrasi deposit dan kredit) ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.</p>

7.	<i>Developing a Financial Inclusion Index for India</i> Sweta Goel & Rahul Sharma (2017)	Kuantitatif <i>Financial Inclusion Index</i> (Sarma, 2008)	Tahun 2005-2012, India dikategorikan sebagai negara dengan tingkat inklusi keuangan yang rendah. Tahun 2013, kondisi inklusi keuangan membaik dan naik menjadi kategori medium. Tahun 2014-2015 tingkat inklusi keuangan India menjadi kategori tinggi dan tujuan pertumbuhan inklusif berhasil dicapai.
8.	<i>Financial Inclusion and economic growth in OIC countries</i> Dai-Won Kim, Jung-Suk Yu, & M. Kabir Hassan (2017)	Kuantitatif -Dynamic Panel Estimation -VAR -IRF -Granger causality test	Terdapat hubungan positif yang jelas diantara Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di 55 negara anggota OKI. Tingkat Inklusi Keuangan merupakan faktor kritikal untuk Pertumbuhan Ekonomi di negara anggota OKI.
9.	<i>Financial Inclusion as a Strategy for Enhanced Economic Growth and Development</i>	Kuantitatif <i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Inklusi Keuangan tidak mendukung Pertumbuhan Ekonomi, tetapi mendukung penanggulangan Kemiskinan di Nigeria

	Lawrence Uchenna Okoye, Kehinde A Adetiloye, Oyalinka Erin, and Nwanna J. Modebe (2017)		
10.	<i>Does Financial Inclusion Spur Economic Growth in India?</i> Sanjaya Kumar Lenka & Ruchi Sharma (2017)	Kuantitatif -IFI: Principal Component Analysis (PCA) -Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Error Correction Model (ECM)	Terdapat dampak positif inklusi keuangan pada pertumbuhan ekonomi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi empiris menempatkan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang searah. Studi ini melaporkan kebijakan liberalisasi keuangan telah berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi di India.
11.	<i>Identifying Constraints to Financial Inclusion and Their Impact on GDP and Inequality: A</i>	Kuantitatif	Dimensi-dimensi inklusi keuangan yaitu akses, kedalaman, dan efisiensi lembaga intermediasi (lembaga keuangan) memiliki pengaruh yang berbeda-beda

	<p><i>Structural Framework for Policy</i></p> <p>Era Dabla-Norris, Yan Ji, Robert Townsend, and D. Filiz Unsal (2015)</p>		<p>pada PDB dan kesenjangan. Selain itu terdapat interaksi yang tinggi dan timbal-balik (<i>trade-off</i>) antar dimensi. Trade-off yang terjadi adalah jika pendapatan tinggi negara diperoleh dari alokasi modal ke entrepreneur yang lebih berbakat, maka entrepreneur tersebut akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada entrepreneur lainnya. Walaupun PDB meningkat akan timbul kesenjangan.</p>
12.	<p>Determinan Keuangan Inklusif di Sumatera Utara, Indonesia</p> <p>Lia Nazliana Nasution, Pipit Buana Sari, & Handriyani Dwilita (2013)</p>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p><i>Time Series</i></p>	<p>Dari segi faktor jumlah penduduk, pendapatan, dan kantor cabang di Sumatera Utara telah cukup mendukung atas penerapan dan pelaksanaan yang lebih baik terhadap keuangan inklusif di Sumatera Utara.</p>
13.	<p><i>The Role of Islamic Finance in</i></p>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p>	<p>Islam menawarkan berbagai instrument yang kaya dan</p>

	<p><i>Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries.</i></p> <p>Mahmoud Mohieldin, Zamir Iqbal, Ahmed Rostom, & Xiaochen Fu (2011)</p>		<p>pendekatan yang tidak konvensional, yang jika diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara berpenduduk muslim yang dilanda kemiskinan.</p> <p>Instrumen ZIS dapat membantu mendorong inklusi keuangan.</p>
14.	<p><i>Can Islamic Banking Increase Financial inclusion?</i></p> <p>Sami Ben Naceur, Adolfo Barajas, & Alexander Massara (2015)</p>	<p>Kuantitatif</p> <p>Regresi Panel Data</p>	<p>Walaupun akses fisik terhadap jasa keuangan telah tumbuh secara pesat di negara-negara anggota OKI, penggunaan jasa keuangan tersebut tidak cepat meningkat. Hasil analisis regresi menunjukkan bukti hubungan positif antara kredit ke rumah tangga dan pembiayaan dengan tujuan investasi ke perusahaan/tempat usaha, tetapi hubungan empiris</p>

			tersebut bersifat sementara dan relatif lemah.
15.	<i>Financial Inclusion: Islamic Finance Persperctive</i> Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor (2012)	Kualitatif Deskriptif	Keuangan Syariah menyediakan kerangka komprehensif untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui prinsip bagi risiko dan melalui kanal redistribusi harta dalam islam yang kurang digunakan di negara-negara muslim.
16.	<i>Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience.</i> Muhamad Abduh & Mohd Azmi Omar (2012)	Kuantitatif <i>Autoregresssive Distributed Lag (ARDL)</i>	Terdapat hubungan signifikan antara Perkembangan Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek di Indonesia (2003 Q1 – 2010 Q2) dan hubungan tersebut bersifat timbal-balik.
17.	<i>Islamic banking and economic growth in GCC & East Asia countries: A panel</i>	Kuantitatif -Panel <i>Cointegration Analysis</i>	Perbankan Syariah berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek di Negara-negara Gulf Cooperation

	<p><i>cointegration analysis</i></p> <p>Rosylin Mohd. Yusof & Mejda Bahlous (2013)</p>	<p><i>-Variance Decompositions (VDCs)</i></p> <p><i>-Impulse Response Functions</i></p>	<p>Council (GCC), Malaysia, dan Indonesia periode tahun 2000-2009. Dalam jangka pendek Perbankan Syariah di Malaysia dan Indonesia lebih berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dibandingkan dengan Negara-negara GCC.</p>
18.	<p><i>Islamic banking presence and economic growth in Southeast Asia</i></p> <p>Hind Lebdaoui & Jeorg Wild (2016)</p>	<p>Kuantitatif</p> <p><i>-Panel Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)</i></p> <p><i>-Two-Stage Regression (2-stage least square)</i></p>	<p>Terbukti adanya hubungan jangka panjang antara Pertumbuhan Ekonomi dan keberadaan Perbankan Syariah di beberapa negara ASEAN periode tahun 2000 Q1- 2012 Q4, tetapi tidak pada jangka pendek. Banyaknya populasi penduduk muslim di negara-negara tersebut memainkan peran positif dan secara statistik menjadi peran signifikan dalam mendukung kontribusi Perbankan Syariah di sektor keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p>

2.2 KERANGKA PIKIR

2.2.1 Inklusi Keuangan

Menurut data Bank Dunia, hanya terdapat 36,1% orang dewasa yang memiliki rekening bank di Indonesia (World Bank, 2014). Dimana 36,1% penduduk tersebut termasuk dalam kategori *banked*, sedangkan 63,9% penduduk dewasa lainnya termasuk dalam kategori *unbanked* atau *underbanked*.

Unbanked atau *underbanked* adalah istilah yang digunakan untuk individu atau masyarakat yang tidak mempunyai rekening di lembaga keuangan formal karena tidak mempunyai akses atau mempunyai rekening dan akses di lembaga keuangan, tetapi penggunaannya rendah yang disebabkan oleh berbagai faktor hambatan (Honohan, 2007), (Kempson, 2006) dan (Solo, 2008).

Terdapat berbagai penyebab eksklusi keuangan yang berbeda-beda di setiap negara. Kempson (2006) dan Solo (2008) mengidentifikasi beberapa penyebab eksklusi keuangan yaitu: (1) Diperlukannya dokumen-dokumen resmi seperti tanda pengenalan identitas dan bukti ketenagakerjaan, hal tersebut termasuk dalam syarat untuk mendaftar di lembaga keuangan tetapi kerap tidak dimiliki oleh masyarakat miskin. (2) Biaya operasional atau transaksi bank tinggi. (3) Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank dianggap oleh masyarakat *unbanked* memberatkan mereka untuk mengakses jasa keuangan bank (contoh: jumlah deposit awal yang tinggi). (4) Minimnya akses ke bank yang disebabkan penurunan jumlah kantor layanan bank. (5) Pembatas-pembatas yang bersifat psikologi dan budaya (masyarakat miskin merasa tidak diterima oleh bank). (6) Penolakan oleh pihak bank karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan bank.

Irving Fisher Committee on Central Bank Statistic (IFC) mengadakan survei pada tahun 2015 di 47 bank sentral negara yang tergabung dalam *Bank of International Settlement* (BIS) terkait kebijakan nasional dan praktik tentang inklusi keuangan. Berikut adalah dimensi-dimensi inklusi keuangan yang sering muncul dalam definisi inklusi keuangan 47 bank sentral negara di dunia.

- 1) Akses ke jasa keuangan, berhubungan dengan kemampuan badan usaha atau individu untuk menggunakan produk dan jasa keuangan, dengan batasan waktu dan jarak tertentu. Pengukuran yang relevan termasuk jarak poin akses, variasi saluran akses (cabang di daerah terpencil, ATM) dan jaringan POS (*Point of Sales*), *agent banking*, *mobile banking*, dll), dan juga hambatan bersifat sosio-ekonomi yang membatasi penggunaan produk dan jasa keuangan.
- 2) Penggunaan produk dan jasa keuangan yang efektif. Seberapa banyak produk dan jasa keuangan yang digunakan masyarakat. Pengukuran konsep ini dilakukan dengan melihat konsumsi produk keuangan yang diobservasi, pola penggunaan, dan perilaku konsumen. Contoh indikator tersebut adalah jumlah persentase individu dewasa atau badan usaha yang memiliki setidaknya satu tipe rekening deposit, rekening tabungan, peminjaman kredit atau kartu kredit; jumlah banyaknya pembiayaan kredit per jumlah orang dewasa; rasio kredit atau nilai deposit per PDB.
- 3) Ketersediaan produk dan jasa keuangan. Dimensi ketersediaan berkaitan dengan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan kepada konsumen. Seperti fokus terhadap berbagai jenis yang ditargetkan untuk masyarakat yang tidak terinklusi, apakah produk dan jasa keuangan tersebut terjangkau biayanya oleh konsumen yang

ditargetkan.

- 4) Kualitas produk dan jasa keuangan. Membahas tentang produk atau jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
- 5) Literasi Keuangan. Literasi Keuangan mencakup pengetahuan seseorang mengenai konsep keuangan, inflasi, risiko investasi, kemampuan berhitung dasar, perilaku mengenai manajemen uang dan tabungan, dan kesadaran mengenai produk dan jasa keuangan.
- 6) Pembiayaan UMKM. Membahas tentang akses pelaku UMKM untuk memiliki rekening di lembaga keuangan formal dan mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Infrastruktur Keuangan, yaitu berbagai elemen yang menyokong berjalannya fungsi sistem keuangan.

Demirgüç-Kunt et al. (2008) menjelaskan Inklusi Keuangan atau akses jasa keuangan yang menyeluruh, didefinisikan sebagai ketiadaan biaya atau hambatan non biaya dalam menggunakan jasa keuangan. Sedangkan Mohieldin et al. (2011) berpendapat bahwa Inklusi Keuangan adalah pemberian jasa keuangan dengan biaya terjangkau untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Sarma (2012) mendefinisikan Inklusi Keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua masyarakat sebagai anggota ekonomi. Demirgüç-Kunt et al. (*Measuring Financial Inclusion: Global Findex*, 2014) menyatakan Inklusi Keuangan adalah Sistem Keuangan yang inklusif – akses terhadap jasa keuangan secara menyeluruh, tanpa biaya atau hambatan non biaya dalam penggunaannya – khususnya bermanfaat bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kurang beruntung lainnya

Bank Dunia (*World Bank*) dalam *Global Financial Development Report* (2014) mendefinisikan Inklusi Keuangan sebagai sebagian dari populasi yang menggunakan jasa keuangan.

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) pada tahun 2016 mendefinisikan Inklusi Keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia berkelanjutan dan teregulasi dengan baik.

Di Indonesia terdapat pula beberapa definisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pemerintah Indonesia. Berikut adalah definisi yang tercantum dalam peraturan:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif mendefinisikan Inklusi Keuangan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pasal 1, Ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat: Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat banyak definisi Inklusi Keuangan yang beragam oleh institusi atau akademik yang berbeda. Karena itu, peneliti mengambil beberapa poin penting atau kesimpulan dari berbagai konsep atau definisi di atas. Inklusi Keuangan adalah sebuah keadaan dimana berbagai jasa layanan keuangan dasar dapat dijangkau oleh semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang kemudian akan terbebas dari berbagai faktor hambatan finansial.

2.2.2 Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah menawarkan sebuah sistem perbankan sehat yang beroperasi tanpa hutang mendorong pembiayaan pada sektor ekonomi riil. Dalil dasar dari keuangan syariah adalah pengembalian modal akan ditentukan berdasarkan hasil keuntungan yang telah didapat, dan besar pengembalian yang diberikan ditentukan oleh keuntungan terhadap aktivitas ekonomi yang dimana dana tersebut digunakan (Iqbal & Mirakhor, 2011:127).

Istilah keuangan syariah digunakan untuk menunjuk pada kegiatan keuangan yang mematuhi hukum islam (syariah). Salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan syariah adalah larangan pembayaran dan penerimaan *riba* (bunga) dalam transaksi keuangan (worldbank.org).

Prinsip dasar sistem keuangan syariah adalah larangan *riba*, berbagi risiko, berdasarkan asset, uang sebagai pengganti modal, larangan perbuatan spekulatif, kesakralan kontrak perjanjian, dan preservasi hak milik (Iqbal & Mirakhor, 2011:10-11).

Ketika dikomparasikan dengan sistem keuangan konvensional, terdapat dua fitur yang berbeda dalam sistem keuangan syariah:

- 1) Pelarangan *riba* menghasilkan pengeliminasian hutang dan yang akhirnya berujung pada kesempatan untuk meningkatkan kinerja sistem keuangan.

- 2) Sistem keuangan yang mendorong pembagian risiko melalui berbagai jenis transaksi yang dirancang untuk membagi risiko dan hasil keuntungan secara adil (Iqbal & Mirakhor, 2011:127).

Semua transaksi dalam sistem syariah harus diatur berdasarkan norma etika islam yang disebutkan dalam hukum syariah. Walaupun islam membebaskan untuk bertransaksi, norma dasar ini tidak mengartikannya sebagai kebebasan yang tidak terkontrol sampai yang terlarang dan dibatasi oleh norma lain. Seperti, pelarangan *Riba* dan *Gharar* (Obaidulah, 2005:21).

Norma etika dalam sistem keuangan syariah (Obaidulah, 2005:10-14)

- 1) Kebebasan untuk berkontrak atau bertransaksi
- 2) Bebas dari *Riba* (bunga)
- 3) Bebas dari *Gharar* (ketidakjelasan)
- 4) Bebas dari *Qimar* (judi) dan *Maysit* (pengasilan/upah yang tidak diberikan)
- 5) Kebebasan mengontrol/memanipulasi harga untuk melawan anomali-anomali yang sengaja bertujuan merusak kompetisi bebas di pasar
- 6) Hak untuk bertransaksi dengan harga adil
- 7) Hak mendapatkan informasi yang adil, lengkap, dan akurat
- 8) Bebas dari *Dharar* (transaksi yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian)
- 9) Kerjasama dan Solidaritas
- 10) *Maslahah Mursalah* (hal yang baik atau bermanfaat untuk banyak orang yang belum ditetapkan oleh hukum syariah).

Karakteristik penting di Keuangan syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan aset dan dari pembiayaan bersistem islami tersebut menciptakan aset riil (Usmani, 2000:10-11)

Keuangan Syariah dapat menjangkau masyarakat dengan melihat prefensi budaya lokal yang kemudian akan mendorong inklusi keuangan. Keuangan

Syariah juga mampu membantu menggerakkan pembiayaan ke UMKM, pendanaan berjangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, dan proyek pembangunan lainnya, yang dimana penting untuk mempercepat pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif (Mohieldin, 2012)

Keuangan Syariah berdasarkan kepercayaan dimana penyedia modal dan pengguna modal harus membagi adil risiko dari usaha bisnis. Jika menggunakan istilah perbankan, deposan, bank, dan peminjam semuanya harus membagi risiko dan hasil dari pembiayaan usaha bisnis tersebut. Secara prinsip, islam menggiatkan kegiatan investasi agar komunitas atau masyarakat secara keseluruhan mendapatkan manfaat dengan menjadi patner, berbagi risiko dan hasil dalam berbisnis dibandingkan hanya menjadi kreditor.

Hubungan antara investor dan bank berbeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dimana dalam perbankan syariah, investor dan bank menjadi patner. Sedangkan di perbankan konvensional memiliki hubungan investor-kreditor. Keuangan Syariah berbasis ekuitas, dimana perbankan konvensional berbasis hutang (Vernandos, 2005)

Ekonomi Islam, dimana keuangan syariah adalah bagian penting di dalamnya, secara luas berdasarkan beberapa larangan dan penggiatan. Pelarangan riba dan perizinan untuk berjualan (QS Al-Baqarah: 275) mendorong aktivitas pembiayaan atau keuangan di dalam perekonomian islam ke bisnis bermodal aset dan transaksi. Hal tersebut mengimplikasikan semua transaksi harus merepresentasikan transaksi nyata atau berupa penjualan barang, jasa atau manfaat (Ayub, 2007: 73).

Struktur keuangan syariah melingkupi pelarangan hasil pendapatan yang berasal dari hutang (riba) dan kelegalitasan sebuah keuntungan (Ayub, 2007).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan "Keuangan Syariah dikategorikan menjadi dua yaitu Perbankan Syariah dan Industri Keuangan non-

bank syariah seperti asuransi syariah, dana pension syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah (*sukuk*), reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya” (ojk.go.id).

a. Perbankan Syariah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

- (Ayat 1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- (Ayat 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- (Ayat 3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dana tau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (Ayat 4) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Definisi mengenai perbankan syariah tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana:

- (Ayat 1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- (Ayat 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- (Ayat 7) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (Ayat 8) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (Ayat 9) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (Ayat 10) Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- (Ayat 12) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

(Ayat 13) Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bank Islam atau di Indonesia lazim disebut sebagai Bank Syariah, merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (OJK, 2016).

i. Dana Pihak Ketiga Syariah

Pasal 1, Ayat 8 Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah menyebutkan Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS yang selanjutnya disebut DPK BUS dan UUS adalah kewajiban BUS dan UUS kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.

Pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

(Ayat 20) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

(Ayat 21) Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

(Ayat 22) Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakuakn pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

(Ayat 23) Giro adalah Simpanan bedasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

- Tabungan Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menetapkan Pertama, tabungan ada dua jenis;

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga,
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*;

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang,

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening,
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya,
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah*;

- 1) Bersifat simpanan,
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan,
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

- Giro Syariah

Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro menetapkan Fatwa tentang Giro. Pertama, Giro ada dua jenis;

- 1) Giro yang tidak dibenarkan secara *syari'ah*, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga,
- 2) Giro yang dibenarkan secara *syari'ah*, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua, ketentuan umum Giro berdasarkan *Mudharabah*;

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening,
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya,
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga, ketentuan umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*;

- 1) Bersifat titipan,
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*),
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

- Deposito Syariah

Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito menetapkan.

Pertama, depositi ada dua jenis;

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara *syari'ah*, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga,
- 2) Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua, ketentuan umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*;

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening,
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional depositi dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

ii. Pembiayaan Syariah

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tahun 2008, dikeluarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang membahas lebih rinci mengenai definisi pembiayaan syariah. Tercantum dalam Pasal 1 Ayat 25 bahwa pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*;
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dengan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

- **Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *Mudharabah* menggunakan akad antara pihak bank sebagai *shahibul maal* dan pihak nasabah sebagai *mudharib*. Dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan pihak nasabah yang mengelola suatu usaha yang produktif. Keuntungan (*nisbah*) yang diperoleh dibagi menurut perjanjian di awal kontrak (Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000, OJK, 2016:65 & Syafi'i Antonio, 2011:95).

- **Pembiayaan *Musyarakah***

Pembiayaan *Musyarakah* menggunakan akad *musyarakah* dimana adalah akad berbentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha atau kegiatan sebagai mitra. Nisbah dari hasil dibagi sesuai kesepakatan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai proporsi kontribusi modal (Syafi'i Antonio, 2011:90 & OJK, 2016:65).

- **Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* menggunakan akad kontrak jual-beli sesuai harga asli ditambah dengan margin atau tambahan keuntungan yang disepakati di awal perjanjian dan tidak dapat berubah nilainya selama masa kontrak berlaku.

Pembayaran atas pembelian dapat dibayarkan secara berangsur (Syafi'i Antonio, 2011:101 & OJK, 2016:181).

- **Pembiayaan *Ijarah***

Pembiayaan ini memakai akad *Ijarah* yang berarti pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran uang sewa selama masa sewa yang disepakati, dimana kepemilikan barang atau jasa tersebut tidak berpindah (Antinoi Syafi'i, 2011:117 & OJK, 2016:183).

- **Pembiayaan *Istishna***

Pembiayaan *Istishna* adalah pembiayaan yang menggunakan akad *istishna*, yaitu akad jual-beli dimana pemesan (nasabah) memesan barang terlebih dahulu dengan harga dan spesifikasi yang telah disepakati di muka kepada lembaga keuangan syariah (LKS). Kemudian, LKS mencari atau membeli barang tersebut dari penjual lain dengan spesifikasi yang disepakati dan menjualnya pada pemesan awal. Pembayaran dapat dibayar dimuka, tengah atau saat penyerahan barang sesuai kesepakatan awal (Syafi'i Antonio, 2011:113 & OJK, 2016:64).

- **Pembiayaan *Qardh***

Pembiayaan yang memakai akad *qardh*, adalah pinjaman lunak yang bersifat sosial atau untuk nasabah yang memerlukan dana cepat. Pinjaman dapat ditagih atau dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa mengambil keuntungan (Syafi'i Antonio, 2011:131 & OJK, 2016:32).

- **Pembiayaan *Salam***

Pembiayaan ini menggunakan akad *salam* yang berarti pembayaran dilakukan dimuka dan barang yang dibeli diserahkan di kemudian hari yang telah disepakati. Dengan harga, jumlah barang, dll disepakati diawal perjanjian (Syafi'i Antonio, 2011:108 & OJK, 2016:35).

iii. Kantor Layanan Cabang Bank

Dalam pasal 1 ayat 11 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertulis Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Kantor layanan bank memiliki beberapa jenis yaitu; Kantor Pusat, Kantor Cabang Penuh, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Selain itu terdapat juga bentuk kantor lain yang bertujuan untuk memberi kemudahan akses dalam melayani dan memberi jasa layanan keuangan untuk masyarakat seperti mobil kas keliling dan agen layanan keuangan digital (*branchless banking*).

b. Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang kegiatan penyertaan modal dan berbagai efek syariah (sukuk, efek saham syariah, reksadana, dll) yang dijual diperjual-belikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*ojk.go.id*)

c. Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah)

Industri Keuangan Non-Bank Syariah adalah industri keuangan non-bank yang terdiri dari lembaga pembiayaan syariah (Baitul maal wat Tamwil), asuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*ojk.go.id*).

2.2.3 Inklusi Keuangan Syariah

Untuk menerangkan perihal Inklusi Keuangan Syariah, merujuk definisi-definisi pada pembahasan mengenai inklusi keuangan dan keuangan syariah pada sub bab di atas maka, dilakukan sintesa bahwa Inklusi Keuangan Syariah adalah

keadaan dimana semua golongan masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan jasa keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, terutama masyarakat yang kemudian akan terbebas dari berbagai hambatan finansial.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 2009). Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. (Simon Kuznets dalam Todaro & Smith, 2003)

Pertumbuhan Ekonomi terjadi ketika; (1) masyarakat mendapatkan lebih banyak sumber daya, ataupun, (2) masyarakat menemukan cara baru menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih efisien. Agar Pertumbuhan Ekonomi meningkatkan standar kehidupan, tingkat pertumbuhan harus melebihi tingkat kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan Ekonomi umumnya didefinisikan sebagai peningkatan PDB riil per kapita (Case dan Fair, 2007)

Pertumbuhan Ekonomi merepresentasikan ekspansi potensi Produk Domestik Bruto (PDB) *national output* suatu negara. Pertumbuhan Ekonomi melibatkan pertumbuhan potensial *output* dalam jangka panjang. Pertumbuhan *output* per kapita merupakan tujuan penting pemerintah karena hal tersebut diasosiasikan dengan rata-rata pendapatan riil dan standar kehidupan (Samuelson & Nordhaus, 2005: 556-557)

Sumber-sumber utama bagi Pertumbuhan Ekonomi adalah adanya investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kualitas sumber daya produktif, dan yang dapat menaikkan produktifitasnya seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi (Todaro & Smith, 2003).

2.3.1 Produk Domestik Bruto per Kapita

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun disebut sebagai PDB per kapita (*bps.go.id*).

PDB adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu. PDB tidak secara langsung mengukur hal-hal yang membuat hidup kita berarti, namun PDB mengukur kemampuan masyarakat untuk memperoleh saran yang membuat hidup berarti (Mankiw et al, 2007).

Terdapat dua jenis PDB yaitu, PDB harga berlaku dan PDB harga konstan, Untuk mengetahui nilai Pertumbuhan Ekonomi dari tahun ke tahun digunakan PDB harga konstan karena menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (*bps.go.id*).

PDB harga konstan menilai barang dan jasa dengan harga yang berlaku pada tahun tertentu di masa lampau dengan melihat bagaimana produksi barang dan jasa dalam perekonomian berubah seiring berjalannya waktu (Mankiw et al, 2007).

2.4 Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan

Secara konsep, penerapan inklusi keuangan dalam islam melalui pembagian risiko dan pendistribusian kekayaan melalui instrumen ZIS (*zakat, sadaqah, waqf, qardh*, dll) (Mohieldin et al, 2011), (Iqbal & Mirakhor, 2012). Menurut Mohieldin et al. (2011) jika instrumen-instrumen tersebut di implementasikan dengan baik dan benar di suatu negara, maka kemiskinan dan ketimpangan dapat berkurang. Naceur et al. (2015) menerangkan terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara indikator inklusi keuangan, kredit ke rumah tangga dan pembiayaan dengan tujuan investasi ke UMKM. Selain itu ditemukan juga peningkatan akses fisik keuangan di negara-negara anggota OKI, namun penggunaan jasa keuangan tidak turut meningkat.

2.5 Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi

Yusof & Bahlous (2013) menunjukan terdapat pengaruh signifikan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) dan beberapa negara di Asia Timur dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dimana perbankan syariah Malaysia dan Indonesia memiliki tingkat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara GCC. Abduh & Omar (2012) melakukan penelitian di Indonesia dengan periode tahun 2003-2010. Ditemukan juga hubungan signifikan antara perkembangan keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan Lebdaoui & Wild (2016) dari hasil penelitiannya di beberapa negara ASEAN menemukan hubungan antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang saja.

2.6 Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Penelitian Sarma (2012) menunjukkan banyak negara yang memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang tinggi adalah negara-negara berpendapatan tinggi. Karena itu inklusi keuangan dan tingkat pendapatan cenderung bergerak ke arah yang sama, walaupun terdapat beberapa pengecualian.

Kim, Yu, & Hassan (2017) melakukan penelitian di 55 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan temuan terdapat hubungan positif antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Lenka & Sharma (2017) juga menemukan inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan yang searah. Okoye et al. (2017) yang melakukan penelitian di Nigeria mendapatkan hasil bahwa inklusi keuangan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, kebijakan inklusi keuangan yang berfokus pada akses ke kredit akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga titik tertentu saja karena berpengaruh negatif terhadap kestabilan keuangan serta kesenjangan. Menurut Sahay et al. (2015) risiko terhadap kestabilan keuangan meningkat seiring meluasnya akses ke kredit tanpa diimbangi dengan pengawasan yang tinggi. *Financial Buffer* atau tambahan modal untuk penyangga akan menyusut ketika akses ke kredit bertambah. Tetapi akses jasa keuangan yang lain selain kredit (tabungan, kantor layanan, ATM, dsb) tidak terlalu mempengaruhi stabilitas keuangan.

Sedangkan dalam model penelitian Dabla-Norris et al. (2015) inklusi keuangan melalui kebijakan alokasi dana berupa pembiayaan yang lebih efisien (seperti pembiayaan untuk entrepreneur yang lebih berbakat) akan meningkatkan PDB, tetapi dapat menimbulkan kesenjangan (karena entrepreneur tersebut penghasilannya menjadi lebih tinggi dari entrepreneur lainnya).

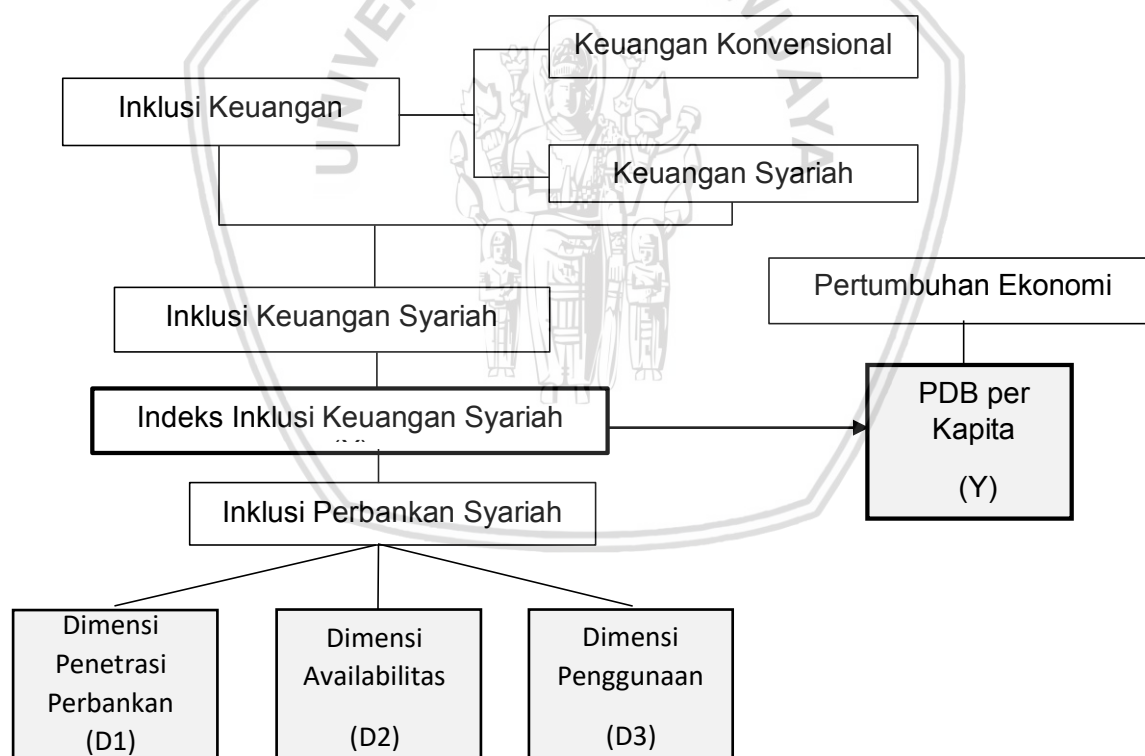
2.7. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka pikir di atas, maka peneliti menyusun hipotesis berikut dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dimana:

H0 = Tidak terdapat pengaruh Indeks Inklusi Keuangan Syariah terhadap PDB per kapita.

H1 = Terdapat pengaruh Indeks Inklusi Keuangan Syariah terhadap PDB per kapita.

2.8. KONSEP PENELITIAN



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian Kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori (*theories*) tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini diukur - biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian – sehingga data yang terdiri dari angka-angkadapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2016: 5). Creswell menyatakan “Peneliti Kuantitatif menguji suatu teori dengan cara memperinci hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut. Strategi eksperimen diterapkan untuk menilai perilaku-perilaku, baik sebelum maupun proses eksperimen. Data dikumpulkan dengan bantuan instrument khusus yang dirancang untuk menilai perilaku-perilaku, sedangkan informasi-informasi dianalisis dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dan pengujian hipotesis”.

Pendekatan Kuantitatif digunakan pada penelitian ini karena untuk mengukur Inklusi Keuangan Syariah seluruh penduduk dewasa di Indonesia, serta mengetahui pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi adalah yang berskala makro sehingga memakai data sekunder (*time-series*).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder makro perbankan syariah per bulan dan Produk Domestik Bruto per kapita selama 36 bulan pada periode Januari tahun 2015 hingga Desember tahun 2017 di Indonesia.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Item	Definisi	Sumber
Variabel Independen (X) Indeks Inklusi Keuangan Syariah	Dimensi Penetrasi Perbankan Syariah	Jumlah rekening DPK Perbankan Syariah	Rasio jumlah rekening Dana Pihak Ketiga	Statistik Perbankan Syariah (SPS) 2015-2017
		Penduduk Indonesia dewasa (+15)	Perbankan Syariah per 1.000 jiwa Penduduk dewasa	<i>World Development Indicators</i> (Bank Dunia) 2015-2017
	Dimensi Availabilitas Syariah	Kantor Layanan Perbankan Syariah	Rasio jumlah Kantor Layanan	Statistik Perbankan Syariah (SPS) 2015-2017
		Penduduk Indonesia dewasa (+15)	Perbankan Syariah per 100.000 jiwa Penduduk dewasa	<i>World Development Indicators</i> (Bank Dunia) 2015-2017
	Dimensi Penggunaan Syariah	Pembiayaan Perbankan Syariah	Jumlah volume Pembiayaan Perbankan Syariah	Statistik Perbankan Syariah (SPS) 2015-2017
Variabel Dependen (Y) PDB per kapita	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita harga konstan	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita harga konstan	Jumlah PDB per jumlah penduduk pertengahan tahun.	<i>World Development Indicators</i> (Bank Dunia) 2015-2017

3.4. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menetapkan sektor keuangan syariah Indonesia sebagai populasi dengan sampel data perbankan syariah yang terdaftar dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK selama 36 bulan pada periode tahun 2015-2017.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Studi Dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan OJK dan Jumlah penduduk Indonesia serta PDB per kapita Indonesia tahun 2015 -2017 yang bersumber dari *World Development Indicator* (WDI) oleh Bank Dunia. Karena data bulanan PDB per kapita tidak tersedia, maka dilakukan interpolasi data (Gujarati, 2004:447). Penelitian ini menggunakan teknik interpolasi data dengan menaksir data bulanan dari data tahunan untuk mendapatkan nilai bulanan PDB per kapita

3.6. Metode Analisis

Penelitian ini memakai dua metode analisis. Pertama untuk mengukur tingkat inklusi keuangan digunakan analisis *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang dikembangkan oleh Sarma (2012). IFI dapat digunakan untuk mengukur tingkat Inklusi Keuangan secara multidimensional dengan menggunakan data makroekonomi. Kedua, untuk mencari pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia digunakan Analisis Regresi Linear Sederhana. Analisis Regresi Linear sederhana digunakan karena dalam penelitian ini variabel yang diteliti berjumlah dua yaitu, Indeks Inklusi Keuangan Syariah sebagai pengukur Inklusi Keuangan Syariah (variabel independen) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai pengukur Pertumbuhan Ekonomi (variabel dependen).

3.6.1 Indeks Inklusi Keuangan

Untuk mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, hal pertama yang dilakukan adalah mengukur tingkat Inklusifitas Keuangan Syariah. Penelitian ini mengadopsi metode Indeks

Inklusi Keuangan yang dikembangkan oleh Sarma (2008, 2012, 2016) dengan pendekatan yang sama dengan pengukuran *Human Development Index* (HDI), *Human Poverty Index* (HPI), dan *Gender Development Index* (GDI) yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP).

Indeks inklusi keuangan merupakan indeks multidimensi untuk menggabungkan berbagai indikator sektor keuangan. Indeks ini dapat digunakan untuk mengkomparasikan tingkat inklusi keuangan berbagai tingkatan wilayah (antar negara, antar provinsi, antar kota, dll) dan dalam periode waktu tertentu yang berbeda (tahunan atau bulanan). Selain itu dapat menggunakan data tingkat makro maupun mikro, tergantung ketersediaan data dan tujuan penelitian. Indeks inklusi keuangan menangkap berbagai indikator dimensi inklusi keuangan menjadi bernilai diantara angka 0 -1.

Dalam penelitiannya Sarma menggunakan data sektor perbankan karena Sarma mempertimbangkan inklusi perbankan sebagai analogi dari inklusi keuangan. Indeks tersebut terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu; dimensi Penetrasi Perbankan (d1), dimensi Availabilitas (d2), dan dimensi Penggunaan (d3).

Menurut Sarma (2012) meskipun akses terhadap lembaga keuangan merupakan dimensi utama dari Inklusi Keuangan. Sebuah sistem keuangan yang terinklusi adalah yang dimana jasa keuangan tersebut tersedia dan digunakan.

Bank Indonesia (BI) memiliki cara untuk mengukur tingkat Inklusi Keuangan dengan menggunakan Indeks Keuangan Inklusif (IKI). IKI menggunakan konsep pengukuran indeks yang serupa dengan Indeks Inklusi Keuangan yang dikembangkan oleh Sarma (2008). IKI terdiri dari beberapa dimensi yaitu, dimensi akses, dimensi penggunaan, dan dimensi kualitas dengan menggunakan data makro jasa perbankan Indonesia.

Penelitian Umar (2017) menggunakan metode indeks inklusi keuangan Sarma (2012) untuk mengukur indeks inklusi keuangan syariah sebagai variabel dengan indikator berupa dimensi aksesibilitas, availabilitas dan penggunaan menggunakan data makro untuk mengukur indeks inklusi keuangan syariah masyarakat miskin di 33 provinsi Indonesia. Dengan fokus perbankan syariah tahun 2010-2015.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan metode yang dikembangkan oleh Sarma (2012) untuk mengukur indeks inklusi keuangan syariah Indonesia seluruh penduduk Indonesia pada periode sebelum dan setelah terbitnya Peraturan Presiden No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2015 – 2017). Dengan batasan penelitian menggunakan data perbankan syariah karena kurangnya ketersediaan data makro keuangan syariah yang menyeluruh dan penelitian terdahulu (Sarma, 2012) yang berpendapat bahwa inklusi perbankan dapat dianggap sebagai proksi inklusi keuangan.

Langkah pertama untuk mengukur indeks inklusi keuangan syariah adalah mengukur indeks masing-masing dimensi indikator perbankan syariah, yaitu:

a. Dimensi Penetrasi Perbankan Syariah (d1)

Semakin banyak penggunaannya, semakin terinklusi sistem keuangan tersebut. Dimensi penetrasi perbankan dilihat dari jumlah orang yang memiliki rekening bank, tetapi karena adanya keterbatasan data, maka digunakan proksi data jumlah rekening bank per total jumlah penduduk (Sarma, 2008). Dimensi penetrasi perbankan syariah di penelitian ini diukur menggunakan perhitungan rasio jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah per 1.000 jumlah penduduk dewasa (15 tahun keatas) Indonesia. DPK perbankan syariah digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan berapa banyak individu yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal syariah dari 1.000 individu. Analisis

data *Global Financial Inclusion Index* oleh Bank Dunia menunjukkan penetrasi rekening lebih tinggi di perekonomian negara yang memiliki pendapatan nasional yang lebih tinggi, diukur berdasarkan PDB per kapita (Demircuc-Kunt & Klapper, 2012).

b. Dimensi Availibilitas Syariah (D2)

Sistem keuangan terinklusi adalah sistem yang penggunaanya mudah untuk mengakses jasa keuangan. Dimensi Availabilitas Syariah diukur menggunakan rasio jumlah kantor layanan perbankan syariah per 100.000 jumlah penduduk dewasa Indonesia (15 tahun keatas). Dimensi Availabilitas Syariah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kantor layanan perbankan syariah tersedia yang dapat melayani per 100.000 individu.

c. Dimensi Penggunaan Syariah (D3)

Dimensi Penggunaan Syariah menggunakan jumlah volume Pembiayaan Perbankan Syariah untuk mengetahui seberapa banyak jasa lembaga keuangan yang telah digunakan oleh individu-individu yang telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal syariah, dengan proksi data jumlah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia. Sarma (2008, 2012, 2016) mengukur dimensi penggunaan dengan rasio kredit per PDB tetapi dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel inklusi keuangan syariah terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dengan PDB per kapita maka digunakan pendekatan penelitian Chitara & Selvam (2013) yang mengukur dimensi penggunaan dengan jumlah volume kredit.

Penelitian Lenka & Sharma (2017) menemukan bahwa membuka kantor layanan bank baru tidak akan mencukupi jika kantor layanan bank tersebut tidak melayani masyarakat, hal tersebut sesuai dengan hasil temuan Naceur et al.

(2015) dimana akses fisik layanan keuangan tumbuh pesat di negara-negara OKI, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan pesat penggunaan layanan keuangannya.

Setelah mengukur ketiga dimensi perbankan syariah maka, dimensi-dimensi tersebut dirubah bentuk menjadi indeks dimensi dengan persamaan berikut agar memiliki nilai diantara 0 dan 1.

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

d_i = indeks dimensi i

w_i = *weight* dimensi i

A_i = nilai asli dimensi i

M_i = batas tertinggi dimensi i

m_i = batas terendah dimensi i

Sarma (2012) menetapkan secara empiris nilai M_i dan m_i . Umar (2017) pada penelitiannya menetapkan nilai M_i dan m_i sebagai batas atas dan batas bawah masing-masing dimensi karena belum diketahuinya pengukuran nilai batas dimensi-dimensi tersebut di Indonesia. Setelah persamaan tersebut di hitung maka hasil indeks dimensi menjadi $0 \leq d_i \leq 1$.

Menurut Sarma (2012) jika semua dimensi dianggap sama pentingnya, maka bobot yang digunakan per dimensi adalah 1 ($w = 1$). Umar (2017) dengan penelitiannya yang mengukur indeks inklusi keuangan syariah penduduk miskin Indonesia, memakai nilai pembobotan tersebut. Jika $W = (1, 1, 1)$ menggambarkan kondisi inklusi keuangan ideal, maka persamaan yang digunakan adalah:

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}}{\sqrt{w}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(1-d_1)^2 + (1-d_2)^2 + \dots + (1-d_n)^2}}{\sqrt{w}} \right) \right] \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

IFI = Indeks Inklusi Keuangan

d_1 = Indeks dimensi 1

d_2 = Indeks dimensi 2

d_n = Indeks dimensi n

w = weight

Untuk melihat proporsi dimensi mana yang memiliki kontribusi terbesar dan terkecil pada Indeks Inklusi Keuangan Syariah, Umar (2017) membandingkan hasil perhitungan masing-masing dimensi yang dirubah ke bentuk indeks dengan persamaan (1). Indeks dimensi yang memiliki nilai terbesar dianggap sebagai indeks dimensi yang memiliki kontribusi paling banyak terhadap indeks inklusi keuangan syariah dst.

Dengan pertimbangan penelitian-penelitian sebelumnya dan penjelasan mengenai metode pengukuran indeks inklusi keuangan di atas, penelitian ini menggunakan persamaan di bawah untuk mengukur tingkat inklusifitas keuangan syariah di Indonesia.

$$ISFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(1-d_1)^2 + (1-d_2)^2 + (1-d_3)^2}}{\sqrt{w}} \right) \right] \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

$ISFI$ = Indeks Inklusi Keuangan Syariah

d_1 = Indeks dimensi Penetrasi Perbankan

d_2 = Indeks dimensi Availabilitas

d_3 = Indeks dimensi Penggunaan

w = weight

Semakin terinklusi keuangan sebuah negara, nilai Indeks Inklusi negara tersebut akan semakin mendekati angka 1. Jika semakin mendekati angka 0,

berarti negara tersebut memiliki tingkat inklusi keuangan yang rendah atau semakin tereksklusi keuangannya.

Tabel 3.2 Kategori nilai Indeks Inklusi Keuangan

Kategori	Nilai Indeks Inklusi Keuangan
Inklusi Keuangan Rendah	0 – 0,3
Inklusi Keuangan Menengah	0,3 -0,6
Inklusi Keuangan Tinggi	0,6 - 1

Sumber: Sarma, 2012

3.6.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi digunakan untuk melihat hubungan linear diantara 2 variabel dan mengestimasi nilai dari variable dependan Y berdasarkan nilai yang dipilih dari variabel independen X (Lind, Marchal, & Wathen, 2012: 507). Analisis Regresi Linear Sederhana terdiri dari 1 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebelum melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi, dilakukan transformasi data pada kedua variabel menjadi bentuk Ln (Logartima *Natural*) dikarenakan perbedaan jenis data variabel. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Inklusi Keuangan Syariah berupa nilai Indeks Inklusi Keuangan Syariah serta variabel dependen adalah Pertumbuhan Ekonomi yang diukur oleh Produk Domestik Bruto per kapita selama periode 36 bulan (Januari 2015 - Desember 2017).

a. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk menguji model regresi penelitian sehingga model tersebut dapat menjadi alat penguji yang valid dan termasuk *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE). Uji Asumsi Klasik untuk Regresi Linear Sederhana terdiri dari 4 yaitu Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Normalitas, dan Uji Heterokedasitas.

i. Uji Normalitas

Uji Normalitas berfungsi untuk mengetahui sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Jika hasil uji terdapat normalitas maka model tersebut dinyatakan valid. Hasil uji dinyatakan normal apabila nilai signifikan $> 0,05$.

ii. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui terjadinya korelasi antar variabel. Jika terjadi Autokorelasi, maka model regresi dinyatakan tidak valid. Pada penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah Uji Breush-Godfrey. Karena menurut Hayashi dalam Gujarati (2004:472) uji Durbin-Watson yang umum dipakai sebagai pengujian autokorelasi akan sulit menguji data *time-series*. Pada uji ini yang dilihat adalah signifikan dari variabel residual. Jika nilai sig variabel residual $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi.

iii. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah diantara sebagian atau seluruh variabel-variabel penjelas dalam penelitian terdapat hubungan linear yang sempurna. Uji ini melihat nilai VIF, Jika nilai VIF berada diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolnearitas dan model dinyatakan valid.

iv. Uji Heterokedasitas

Uji Heterokedasitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan varian dari nilai residual semua amatan. Jika dari hasil uji terdapat heterokedasitas, maka model regresi akan dinyatakan tidak valid. Sedangkan jika tidak terdapat

heterokedasitas maka model regresi dinyatakan valid. Heterokedasitas dinyatakan tidak ada jika hasil *Scatter Plot Diagram* plot-plot penyebarannya membentuk suatu pola.

b. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji Regresi Linear Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika hasil signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen

c. Uji Hipotesis

i. Uji F

Uji f dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel. Jika f hitung $< f$ tabel maka H_0 diterima, sedangkan jika f hitung $> f$ tabel maka H_0 ditolak dan model regresi dinyatakan signifikan.

ii. Uji T

Uji t adalah uji parsial yang menguji bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau satu persatu. Uji ini dilakukan dengan membandingkan hasil t hitung dengan hasil t tabel. Jika t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima, sedangkan, jika t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan model dinyatakan signifikan.

iii. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinan ditentukan dengan melihat nilai R^2 yang didapatkan, kemudian nilai R^2 tersebut dikalikan dengan 100%

sehingga dapat diketahui berapa persen variabel independen memengaruhi variabel dependen.

iv. Model Penelitian

$$LNPDBk = LNb_0 + b_1 LNIKS$$

Keterangan:

$LNPDBk$ = Logaritma Natural Produk Domestik Bruto per kapita

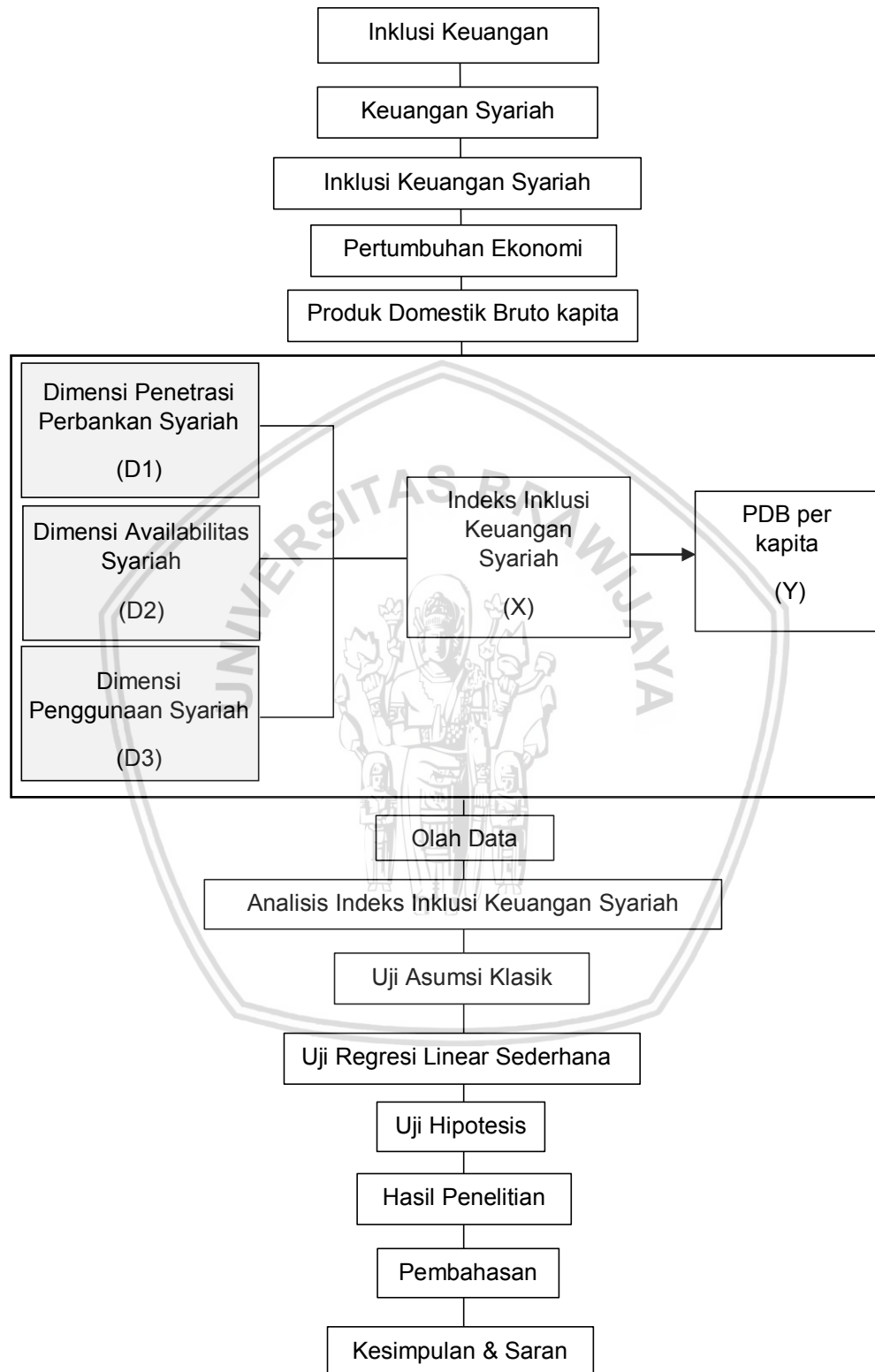
LNb_0 = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi

$LNIKS$ = Logaritma Natural Indeks Inklusi Keuangan
Syariah



3.7. KERANGKA BERPIKIR



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Dimensi Sektor Keuangan Syariah

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Dimensi Sektor Keuangan Syariah

Tahun	Bulan	D1	D2	D3
2015	Januari	83	1,59	Rp202.283.436.000.000
	Februari	84	1,59	Rp202.636.212.000.000
	Maret	84	1,58	Rp205.928.058.000.000
	April	85	1,56	Rp206.852.101.000.000
	Mei	85	1,56	Rp209.329.635.000.000
	Juni	86	1,55	Rp211.617.698.000.000
	Juli	86	1,55	Rp210.396.840.000.000
	Agustus	86	1,54	Rp211.488.726.000.000
	September	91	1,51	Rp213.798.380.000.000
	Oktober	93	1,49	Rp213.451.299.000.000
	November	104	1,48	Rp214.865.115.000.000
	Desember	105	1,47	Rp218.761.171.000.000
2016	Januari	105	1,45	Rp216.965.534.000.000
	Februari	106	1,42	Rp217.428.301.000.000
	Maret	105	1,42	Rp219.452.944.000.000
	April	103	1,38	Rp219.615.154.000.000
	Mei	105	1,37	Rp224.183.444.000.000
	Juni	103	1,35	Rp228.638.834.000.000
	Juli	104	1,36	Rp226.550.580.000.000
	Agustus	105	1,34	Rp226.937.856.000.000
	September	116	1,40	Rp241.452.845.000.000
	Oktober	119	1,40	Rp243.517.602.000.000
	November	122	1,39	Rp246.972.216.000.000
	Desember	124	1,40	Rp254.669.556.000.000
2017	Januari	117	1,39	Rp251.176.400.000.000
	Februari	125	1,38	Rp252.687.177.000.000
	Maret	127	1,38	Rp257.577.352.000.000
	April	128	1,37	Rp259.468.522.000.000
	Mei	130	1,38	Rp264.231.517.000.000
	Juni	131	1,38	Rp272.837.381.000.000

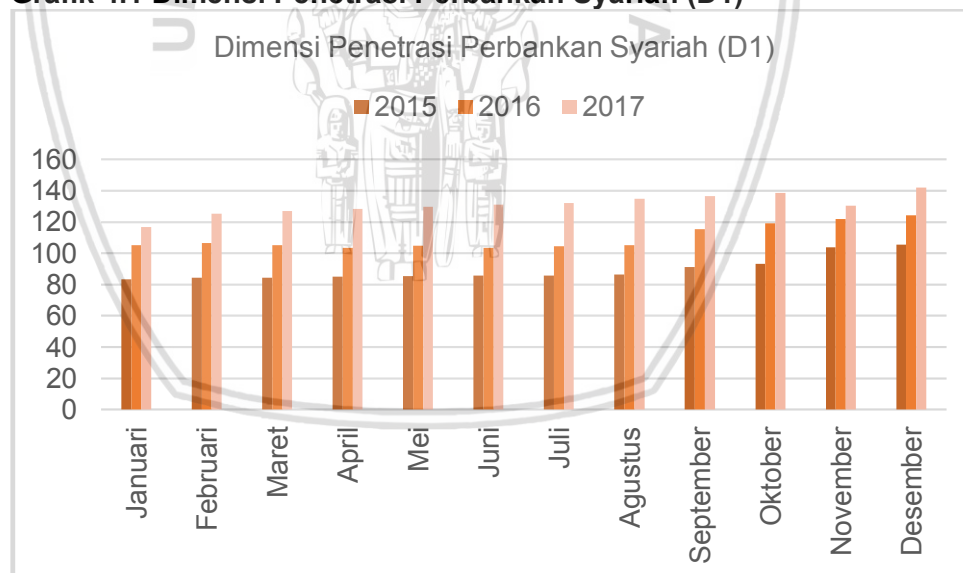
	Juli	132	1,37	Rp271.831.480.000.000
	Agustus	135	1,37	Rp274.746.248.000.000
	September	137	1,37	Rp279.132.280.000.000
	Oktober	138	1,37	Rp281.826.581.000.000
	November	130	1,36	Rp284.179.312.000.000
	Desember	142	1,36	Rp293.458.951.000.000

Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Dimensi Sektor Keuangan Syariah

Statistics			
	D1	D2	D3
Mean	110.135	1.434	236970742700000
Std. Deviation	18.622	.081	27513510260000
Minimum	83.345	1.345	202283436000000
Maximum	141.869	1.593	293458951000000

a. Dimensi Penetrasi Perbankan Syariah (D1)

Grafik 4.1 Dimensi Penetrasi Perbankan Syariah (D1)



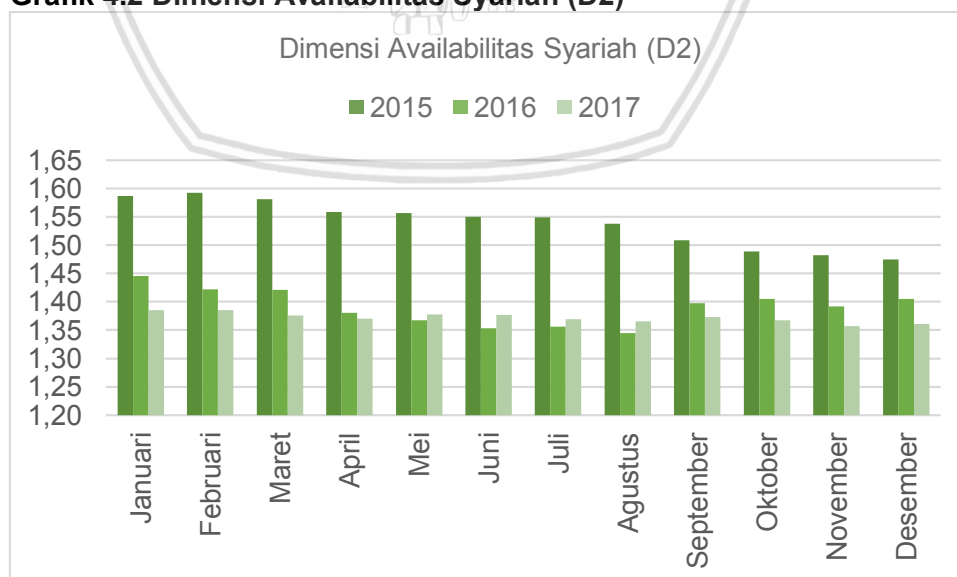
Dari hasil perhitungan, didapatkan nilai rata-rata perbulan dimensi penetrasi perbankan syariah adalah sebesar 110 selama periode 2015-2017. Pengukuran nilai dimensi penetrasi perbankan syariah terendah adalah pada bulan Janurari 2015 sebesar 83 unit, dan tertinggi pada bulan Desember 2017 sebesar 142 unit.

Pada tahun 2015 nilai tertinggi dimensi terendah berda pada periode bulan Januari senilai 83 unit dan nilai tertinggi pada periode bulan Desember sebesar 105 unit. Dengan rata-rata nilai dimensi sebesar 89 unit dalam 1 tahun. Kemudian di tahun 2016, nilai terendah dimensi jatuh pada periode bulan Juni dengan nilai 103 unit dan nilai tertinggi sebesar 105 unit. Nilai rata-rata dimensi di tahun 2016 sebesar 110 unit. Tahun 2017, hasil terendah dimensi berada pada periode bulan Januari sebesar 117 unit dan nilai tertinggi pada periode bulan Desember dengan nilai 142 unit. Rata-rata nilai dimensi di tahun 2017 sebesar 131 unit.

Selama tahun 2015-2017, rata-rata terdapat 110 rekening Perbankan Syariah dari setiap 1.000 penduduk dewasa Indonesia. Yang berarti, tingkat penetrasi perbankan syariah penduduk dewasa di Indonesia sebesar 11%. Dimensi Penetrasi Perbankan Syariah selama 3 tahun periode amatan, memiliki pergerakan yang terus meningkat.

b. Dimensi Availabilitas Syariah (D2)

Grafik 4.2 Dimensi Availabilitas Syariah (D2)



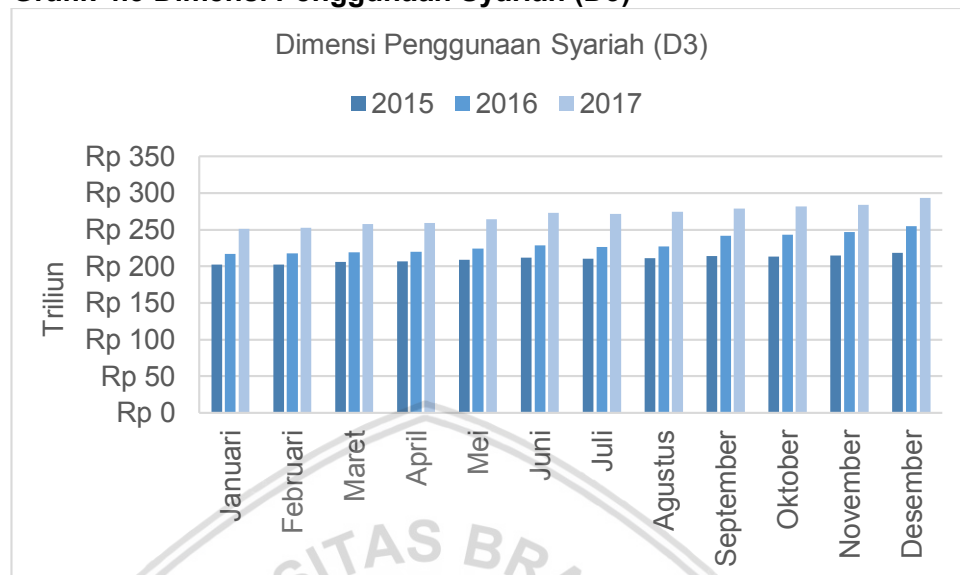
Hasil rata-rata selama 3 tahun amatan dimensi availabilitas syariah didapatkan sebesar 1,43 unit. Nilai terendah jatuh pada periode Februari 2015 dengan nilai sebesar 1,34 unit dan nilai tertinggi berada pada periode Agustus 2016 sebesar 1,59 unit.

Tahun 2015, rata-rata nilai dimensi availabilitas sebesar 1,54 unit. Nilai terendah pada periode bulan Desember sebesar 1,47 unit, sedangkan nilai tertinggi berada pada periode bulan Februari dengan nilai sebesar 1,59 unit. Di tahun 2016, rata-rata nilai dimensi sebesar 1,34 unit, nilai terendah jatuh pada periode Agustus sebesar 1,34 unit dan nilai tertinggi pada periode bulan Januari sebesar 1,45 unit. Kemudian di tahun 2017, rata-rata nilai dimensi sebesar 1,34 unit, nilai terendah jatuh pada periode bulan November sebesar 1,36 unit dan nilai tertinggi berada di periode bulan Januari dengan nilai sebesar 1,39 unit.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio dimensi ini sebesar 1,43 yang berarti terdapat rata-rata 14 unit kantor layanan perbankan syariah yang dapat melayani 10 juta penduduk dewasa Indonesia pada periode tahun 2015-2017. Pergerakan hasil pengukuran dimensi ini cenderung mengalami penurunan, walaupun sempat mengalami kenaikan pada periode kuartal akhir tahun 2016 dan kembali terus menurun hingga akhir tahun 2017.

c. Dimensi Penggunaan Syariah (D3)

Grafik 4.3 Dimensi Penggunaan Syariah (D3)



Rata-rata dimensi Penggunaan Syariah diukur dari volume pembiayaan syariah selama 3 tahun amatan sebesar Rp236 triliun. Dengan jumlah terendah jatuh pada periode Januari 2015 sebesar Rp202 triliun dan jumlah tertinggi terdapat pada periode bulan Desember 2016 sebesar Rp 293 triliun.

Tahun 2015, rata-rata jumlah pembiayaan syariah sebesar Rp210 triliun, dengan jumlah terendah pada periode bulan Januari sebesar Rp201 triliun sedangkan jumlah tertinggi pada periode bulan Desember sebesar Rp218 triliun. Tahun 2016, rata-rata jumlah pembiayaan syariah sebesar Rp230 triliun dengan jumlah terendah jatuh pada periode bulan Januari sebesar Rp216 triliun dan jumlah tertinggi pada periode bulan Desember sebesar Rp254 triliun. Di tahun 2017, rata-rata jumlah volume pembiayaan syariah sebesar Rp270 triliun. Jumlah terendah jatuh di periode bulan Januari sebesar Rp251 triliun dan jumlah tertinggi berada pada periode bulan Desember sebesar Rp293 triliun.

Dimensi ini digunakan untuk mengukur besaran penggunaan perbankan syariah oleh penduduk Indonesia melalui penggunaan jasa layanan pembiayaan syariah. Dimana rata-rata pembiayaan syariah untuk periode 2015-2017 sebesar Rp236 Triliun yang telah diberikan untuk penduduk Indonesia. Dimensi penggunaan syariah selama masa amatan memiliki pergerakan yang terus meningkat.

4.1.2. Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS)

Tabel 4.3 Tabel Hasil Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS)

Tahun	Bulan	d1	d2	d3	IIKS	Kategori IIK
2015	Januari	0,000	0,978	0,000	0,375	Menengah
	Februari	0,016	1,000	0,004	0,385	Menengah
	Maret	0,020	0,957	0,040	0,380	Menengah
	April	0,061	0,864	0,050	0,363	Menengah
	Mei	0,036	0,857	0,077	0,361	Menengah
	Juni	0,043	0,829	0,102	0,359	Menengah
	Juli	0,038	0,825	0,089	0,368	Menengah
	Agustus	0,051	0,781	0,101	0,345	Menengah
	September	0,135	0,662	0,126	0,330	Menengah
	Oktober	0,168	0,582	0,122	0,309	Menengah
	November	0,349	0,556	0,138	0,357	Menengah
	Desember	0,378	0,526	0,181	0,367	Menengah
2016	Januari	0,373	0,408	0,161	0,319	Menengah
	Februari	0,395	0,312	0,166	0,295	Rendah
	Maret	0,371	0,307	0,188	0,292	Rendah
	April	0,344	0,145	0,190	0,232	Rendah
	Mei	0,369	0,094	0,240	0,243	Rendah
	Juni	0,342	0,036	0,289	0,235	Rendah
	Juli	0,361	0,047	0,266	0,237	Rendah
	Agustus	0,373	0,000	0,270	0,232	Rendah
	September	0,550	0,213	0,430	0,402	Menengah
	Oktober	0,614	0,243	0,452	0,439	Menengah
	November	0,658	0,190	0,490	0,450	Menengah
	Desember	0,697	0,243	0,575	0,505	Menengah
2017	Januari	0,573	0,165	0,536	0,429	Menengah
	Februari	0,717	0,163	0,553	0,513	Menengah
	Maret	0,744	0,125	0,606	0,493	Menengah
	April	0,769	0,104	0,627	0,500	Menengah

	Mei	0,792	0,136	0,679	0,531	Menengah
	Juni	0,817	0,131	0,774	0,563	Menengah
	Juli	0,831	0,100	0,763	0,554	Menengah
	Agustus	0,877	0,083	0,795	0,569	Menengah
	September	0,909	0,115	0,843	0,599	Menengah
	Oktober	0,942	0,091	0,872	0,606	Tinggi
	November	0,802	0,049	0,898	0,566	Menengah
	Desember	1,000	0,066	1,000	0,639	Tinggi

Tabel 4.4 Deskripsi Statistik Indeks Dimensi Keuangan Syariah

Statistics			
	d1	d2	d3
Mean	.458	.361	.380
Std. Deviation	.318	.328	.302
Minimum	.000	.000	.000
Maximum	1.000	1.000	1.000

Berdasarkan hasil perhitungan 3 indeks dimensi sektor keuangan syariah, didapatkan indeks dimensi penetrasi perbankan syariah (d1) memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi sebesar 0,458. Selanjutnya indeks dimensi penggunaan syariah (d2) sebesar 0,380 dan indeks dimensi availabilitas syariah (d3) sebesar 0,361. Karena di penelitian ini masing-masing dimensi dianggap sama pentingnya dengan nilai pembobotan yang sama ($w = 1$) hal tersebut menunjukkan bahwa indeks dimensi penetrasi perbankan (d1) yang paling memengaruhi indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia, kemudian diikuti dengan indeks dimensi penggunaan syariah (d3) dan indeks dimensi availabilitas syariah (d2)

Tabel 4.5 Deskripsi Statistik Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Statistics	
IIKS	
Mean	.409
Std. Deviation	.119
Minimum	.232
Maximum	.639

Nilai rata-rata IKS yang didapatkan dari hasil pembobotan adalah sebesar 0,409. Dengan nilai terendah pada periode bulan April 2016 sebesar 0,232 dan nilai tertinggi pada periode bulan Desember 2017 sebesar 0,639.

Tahun 2015, nilai terendah IKS jatuh pada periode bulan Oktober sebesar 0,309 dan nilai tertinggi di periode bulan Februari dengan nilai sebesar 0,385. Rata-rata hasil IKS yang didapat tahun 2015 sebesar 0,385. Kemudian di tahun 2016, nilai IKS berada pada periode bulan April dengan nilai sebesar 0,232 dan nilai tertinggi berada pada periode bulan Desember sebesar 0,505. Rata-rata nilai yang didapat di tahun 2016 sebesar 0,323. Selanjutnya di tahun 2017, nilai IKS terendah jatuh pada periode bulan Januari sebesar 0,429 dan nilai tertinggi berada pada periode bulan Desember sebesar 0,639, dengan rata-rata nilai IKS tahun 2017 sebesar 0,547.

Periode bulan September 2016 terjadi kenaikan nilai IKS paling tinggi sebesar 0,169. Sedangkan pada periode bulan Januari 2017 mengalami penurunan nilai tertinggi sebesar 0,075.

Grafik 4.4 Indeks Inklusi Keuangan Syariah Indonesia 2015-2017



Mayoritas periode yang diamati, IKS Indonesia termasuk dalam kategori menengah. Selama 7 bulan berturut-turut (Februari 2016 hingga Agustus 2016)

IICS Indonesia menurun menjadi termasuk dalam kategori rendah. Hanya terdapat 2 bulan dimana IICS Indonesia termasuk dalam kategori Inklusi Keuangan tinggi yaitu, periode bulan Oktober 2017 senilai 0,606 dan bulan Desember 2017 senilai 0,639.

4.1.3. Analisis Pengaruh Indeks Inklusi Keuangan Syariah terhadap PDB per kapita

a. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Ln_IICS	Ln_PDBK
N		36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.9357	33.5040
	Std. Deviation	.30042	.03291
Most Extreme Differences	Absolute	.109	.072
	Positive	.083	.072
	Negative	-.109	-.068
Test Statistic		.109	.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

Pengujian Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk mengetahui data variabel berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil uji didapatkan nilai Signifikan variabel LNIIKS sebesar 0,200 dan variabel LNPDBK sebesar 0,200. Karena kedua variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 (LNIIKS: 0,200 > 0,05 dan LNPDBK: 0,200 > 0,05) maka pada variabel LNIIKS dan LNPDBK dinyatakan berdistribusi normal.

- Uji Autokorelasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-33.569	.000		-54637259.110	.000
	RES_2	-7.259E-14	.000	.000	.000	1.000
	Ln_IKS	-.070	.000	-.883	-56569057.310	.000
	Ln_PDBK	1.000	.000	1.328	54628939.760	.000
a. Dependent Variable: Unstandardized Residual						

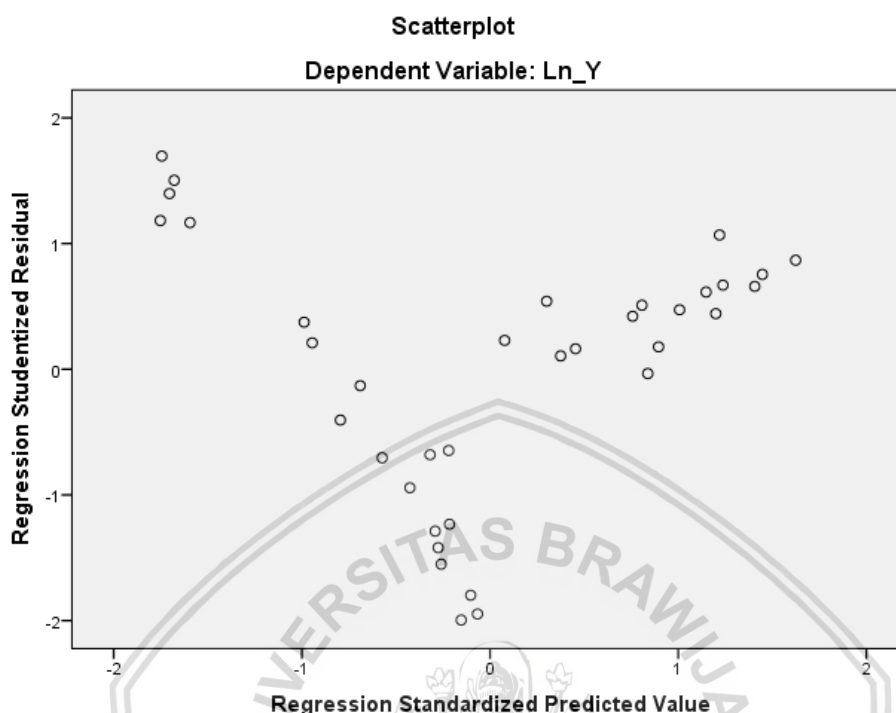
Untuk mencari autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey, yang melihat autokorelasi pada variabel residualnya. Jika probabilitas signifikan > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Dimana pada penelitian ini variabel residual (RES_2) memiliki signifikansi sebesar 1.00 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

- Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	33.569	.014		2366.172	.000	33.541	33.598		
	Ln_IKS	.070	.014	.639	4.839	.000	.041	.099	1.000	1.000
a. Dependent Variable: Ln_PDBK										

Untuk melihat terjadinya multikolinearitas dilihat dari hasil VIF, jika nilai VIF berada diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolenieritas. Hasil uji multikolinearitas yang didapatkan adalah VIF = 1.000. Karena itu data variabel penelitian ini dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

- Uji Heterokedasitas



Dari grafik *scatterplot* dapat diamati bahwa plot-plot kedua variabel tidak membentuk suatu pola, tidak bergelombang mengecil dan membesar, terdapat plot di angka 0, plot-plot tidak berkumpul di atas dan bawah grafik, dan plot-plot menyebar. Karena itu data variabel penelitian ini tidak terjadi heterokedasitas.

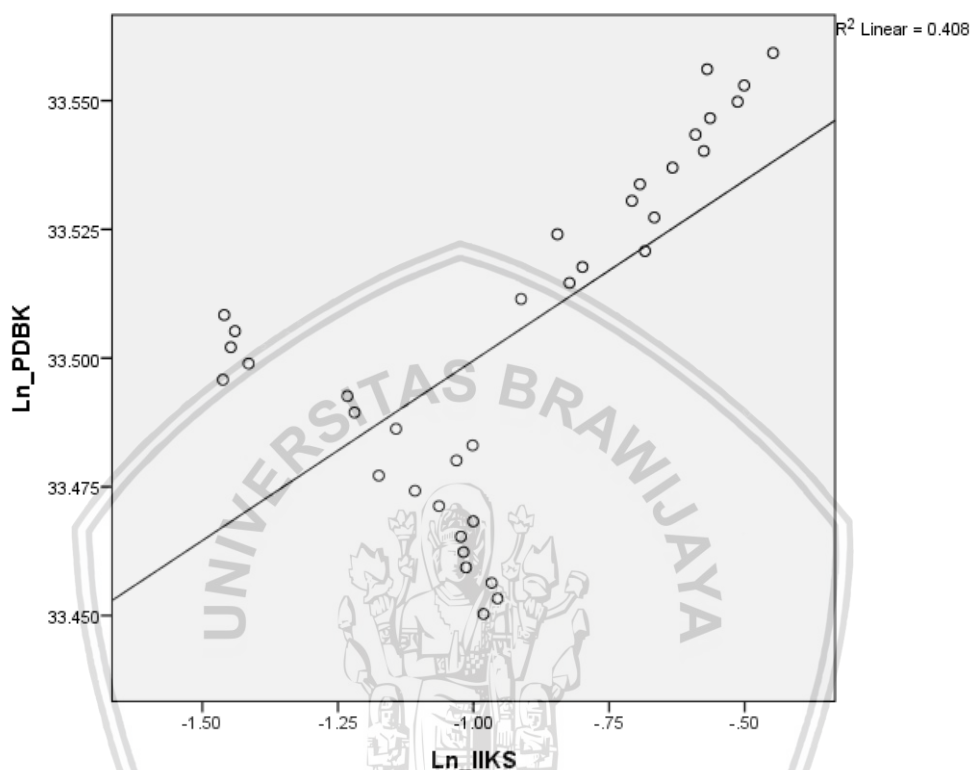
b. Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	33.569	.014		2366.172	.000	33.541	33.598		
	Ln_X	.070	.014	.639	4.839	.000	.041	.099	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Ln_Y

a. Dependent Variable: Ln_Y

Dari hasil uji regresi linear sederhana, didapatkan signifikan sebesar 0,00. Karena $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh Indeks Inklusi Keuangan Syariah terhadap PDB per kapita.



Persamaan Regresi Linear yang didapat adalah:

$$\text{LNPD BK} = 33.569 + 0,070 \text{ LNIJKS}$$

Keterangan:

LNPD BK = Logaritma Natural Produk Domestik Bruto per kapita

$\text{LN}b_0$ = 33.569

b_1 = 0,070

IJKS = Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Untuk mengetahui nilai konstanta, maka LNb_0 dirubah menjadi anti log sebesar 379.167.812.477.630. Yang berarti, jika nilai Indeks Inklusi Keuangan Syariah bernilai 0, maka besar PDB per kapita adalah Rp379 triliun. Dimana jika nilai Indeks Inklusi Keuangan Syariah naik 1 satuan maka PDB per kapita akan meningkat sebesar 0,070 satuan atau 0,070 triliun rupiah.

4.2. PENGUJIAN HIPOTESIS

4.2.1. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.015	1	.015	23.414	.000 ^b
	Residual	.022	34	.001		
	Total	.038	35			
a. Dependent Variable: Ln_PDBK						
b. Predictors: (Constant), Ln_IIKS						

Nilai f hitung yang didapat sebesar 23,414. Karena f hitung lebih besar daripada f table $\alpha = 0,05$ dan numerator (23,414 > 4,130). Karena itu variabel LNIKS memengaruhi secara simultan terhadap variabel LNPD BK. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya terdapat pengaruh Indeks Inklusi Keuangan Syariah terhadap PDB per kapita.

4.2.2. Uji T

Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	33.569	.014		2366.172	.000	33.541	33.598		
	Ln_X	.070	.014	.639	4.839	.000	.041	.099	1.000	1.000
a. Dependent Variable: Ln_Y										

Nilai t hitung yang didapat adalah sebesar 4,839 dan lebih besar dari nilai t table $\alpha = 0,05$ ($4,839 > 1,690$) yang berarti variabel LNIKS memengaruhi variabel LNPDBK secara parsial. Karena itu H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu, terdapat pengaruh Indeks Inklusi Keuangan Syariah terhadap PDB per kapita.

4.2.3. Koefisien Determinan

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.639 ^a	.408	.390	.02569	.408	23.414	1	34	.000	.120
a. Predictors: (Constant), Ln_IKKS										
b. Dependent Variable: Ln_PDBK										

Untuk melihat Koefisien Determinan, digunakan nilai *R squared* hasil olah data. Nilai *R squared* yang didapat sebesar 0,408, yang berarti variabel LNIKS berpengaruh terhadap variabel LNPDBK sebanyak 40,8%. LNPDBK dipengaruhi sebesar 59,2% dari variabel-variabel independen lainnya diluar dari yang penelitian ini.

4.3. PEMBAHASAN

4.3.1 Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Rata-rata nilai Indeks Inklusi Keuangan Syariah Indonesia selama periode 2015-2017 sebesar 0,409. Menurut kategori nilai indeks inklusi keuangan yang ditetapkan Sarma (2012) karena memiliki nilai indeks diantara 0,3 - 0,6 tingkat inklusifitas keuangan syariah di Indonesia termasuk ke dalam kategori menengah.

Indeks dimensi penetrasi perbankan (d1) adalah indeks yang memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi dari 3 indeks dimensi sektor perbankan syariah

menunjukkan bahwa pada inklusi keuangan syariah di Indonesia, jumlah masyarakat yang telah memiliki rekening perbankan syariah memiliki kontribusi yang lebih besar daripada dimensi availabilitas syariah dan dimensi penggunaan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya saluran jasa dan layanan perbankan dan jumlah volume pembiayaan perbankan syariah memiliki proporsi kontribusi yang lebih kecil dalam inklusi keuangan syariah di Indonesia pada periode yang diteliti.

Karena jumlah kantor layanan perbankan syariah sebagai bentuk akses fisik jasa layanan mewakili seberapa banyak masyarakat yang terjangkau oleh jasa layanan perbankan syariah dan jumlah volume pembiayaan syariah sebagai bentuk penggunaan jasa layanan perbankan syariah oleh masyarakat Indonesia memiliki proporsi kontribusi yang lebih kecil. Sehingga, terdapat indikasi bahwa masyarakat Indonesia belum optimum menggunakan jasa layanan keuangan syariah seperti kantor layanan dan pembiayaan syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa layanan keuangan syariah cenderung belum memiliki pemahaman secara komprehensif mengenai fitur produk, manfaat dan risiko jasa layanan keuangan syariah (OJK, 2017).

Inklusi Keuangan Syariah Indonesia selama 36 bulan tahun 2015-2017 memiliki tren yang cenderung menurun dari periode Januari 2015 hingga Agustus 2016. Kemudian, terjadi peningkatan nilai IKS di periode September 2016 yang terus meningkat hingga periode Desember 2017. Peningkatan pada periode September 2016 terjadi setelah Perpres No.82 tahun 2016, kebijakan yang mengatur pelaksanaan Inklusi Keuangan di Indonesia mulai berlaku pada tanggal 7 September 2016. Jika melihat dari hasil pengukuran indeks dimensi sektor keuangan syariah, dapat diamati bahwa kenaikan jumlah rekening perbankan

syariah (indeks dimensi penetrasi perbankan) dan jumlah kantor layanan (indeks dimensi availabilitas) pada bulan September 2016 adalah bukti dari dampak diberlakukannya kebijakan tersebut. Salah satu bentuk dari kebijakan tersebut adalah pembentukan Agen Layanan Keuangan Digital (LKD), agar masyarakat dapat mengakses jasa dan terlayani oleh perbankan tanpa harus ke kantor bank karena berbagai faktor hambatan dan Pendirian kantor cabang di daerah terpencil agar dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

4.3.2. Pengaruh Indeks Inklusi Keuangan terhadap PDB per kapita

Berdasarkan hasil olah data, ditemukan Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS) berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto per Kapita sebesar 40,8% dan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya sebesar 59,2%. Hal ini disebabkan oleh pengukuran IIKS pada penelitian ini memiliki batasan penelitian berupa penggunaan data sektor perbankan syariah formal sebagai proksi untuk pengukuran indeks karena keterbatasan data. Hasil penelitian bahwa Inklusi Keuangan berpengaruh dengan Pertumbuhan Ekonomi sesuai dengan temuan penelitian terdahulu oleh Sarma (2012), Lenka & Sharma (2017), Kim, Yu, & Hassan (2017).

Menurut Dabla-Norris et al (2015), Inklusi Keuangan dapat menaikkan Pertumbuhan Ekonomi lewat penyaluran pembiayaan untuk masyarakat, terutama yang memiliki bisnis/usaha, dimana jika bisnis/usaha tersebut berkembang dan produktivitasnya meningkat, kemudian dapat meningkatkan output agregat suatu negara. Sedangkan menurut King dan Levine (1993) pendalaman sistem keuangan suatu negara sebesar 1% dapat menaikkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar ~0,03%. Sistem Keuangan yang lebih baik akan menstimulasi pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan output per

kapita yang lebih cepat dengan membiayai sumber daya masyarakat ke usaha peningkatan produktivitas yang menjanjikan.

Inklusi Keuangan untuk individu maupun badan usaha, dipandang sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat pemenuhan akses dan penggunaan jasa keuangan formal, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan dan dapat memajukan perkembangan ekonomi (Sahay et al, 2015).

Inklusi Keuangan Syariah juga dapat membantu strategi utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satunya adalah Pilar Pendalaman Pasar Keuangan Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan *share* keuangan syariah dan meningkatkan *share outstanding* pasar uang syariah (*bi.go.id*).

Menurut Mankiw et al (2007) peningkatan nilai tabungan dan investasi adalah salah satu cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Dimana Inklusi Keuangan berperan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pendekatan keislaman, mendorong aktivitas pembiayaan dan keuangan di dalam suatu perekonomian seperti pembiayaan untuk memajukan suatu usaha atau transaksi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia (Ayub, 2007).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Hasil pengukuran Indeks Inklusi Keuangan Syariah menunjukkan bahwa tingkat inklusifitas keuangan syariah di Indonesia berada pada kategori menengah. Terjadi peningkatan nilai indeks inklusi keuangan syariah pada bulan September tahun 2016 dimana pada bulan tersebut mulai diberlakukannya Perpres No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan mengenai inklusi keuangan berhasil menaikkan tingkat inklusi keuangan syariah pada periode tahun 2015-2017. Karena sejak diberlakukannya SNKI, hasil pengukuran indeks inklusi keuangan syariah terus meningkat hingga akhir tahun 2017.

Inklusi Keuangan Syariah yang diukur dengan Indeks Inklusi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan PDB per kapita Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah yang didukung oleh kebijakan pemerintah dapat mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam pengukuran indeks didapatkan bahwa dimensi availabilitas syariah yang memiliki proporsi kontribusi terkecil dapat ditingkatkan dengan menambah jenis saluran jasa layanan keuangan syariah selain kantor layanan bank seperti ATM, Kios Agen Bank (*branchless banking*), dan *e-banking*. Meningkatkan jumlah ketersediaan dan jenis saluran jasa layanan perbankan syariah lain dapat memudahkan akses masyarakat pengguna jasa keuangan syariah.

5.2 SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, pengukuran Indeks Inklusi Keuangan dapat menambahkan dimensi sektor keuangan syariah yang lain atau menggunakan

data sektor keuangan syariah selain perbankan syariah. Peneliti selanjutnya juga dapat menyertakan data Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pengukuran indeks, karena Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia lebih menyentuh dan menjangkau masyarakat. Sehingga dapat melihat pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara komprehensif.

Pemerintah dapat mempertimbangkan peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam perencanaan kebijakan mengenai penerapan Inklusi Keuangan Syariah dalam rangka mendorong Pertumbuhan Ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Omar, M.A. 2012. Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol.5, (No.1) :35-47.
- Ayub, M. 2007. *Understanding Islamic Finance*. West Sussex : John Wiley & Sons, Ltd.
- Babajide, A.A., Adegboye, F.B., & Omankhanlem, A.E. 2015. Financial inclusion and economic growth in Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.5, (No.3) : 629-637.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)*. <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab1> diunduh pada 14 Agustus 2018.
- Bank Indonesia. 2014. *Buku Saku Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chithra, N., & Selvam, M. 2013. Determinants of Financial Inclusion: An Empirical Study on the Inter-State Variations in India. *SSRN Electronic Journal*. <https://ssrn.com/abstract=2296096> diunduh pada 13 September 2018.
- Creswell, John.W. 2017. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dabla-Norris, E., Ji, Y., Townsend, R., & Unsal, D.F. 2015. Identifying constraints to financial inclusion and their impact on GDP and inequality: a structural framework for policy. *IMF Working Paper*, Vol.15, (No.22) : 4-49.
- Demirgüç-Kunt, A., Beck, T., & Honohan, P. 2008. Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access. *World Bank Policy Research Report*.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L. 2012. Measuring financial inclusion: the global finindex database. *Policy Research Working Paper*, Vol.1, (No.6025) : 1-61.

- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., & Randall, D. 2013. Islamic finance and financial inclusion: measuring use of and demand for formal financial services among muslim adults. *Policy Research Working Paper*, Vol.1, (No. 6642) : 2-43.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Oudheusden, P. 2014. The global finindex database: measuring financial inclusion around the world. *Policy Research Working Paper*, Vol.1, (No.7255) : 1-97.
- Financial Inclusion Insights: Indonesia Wave 3 Report FII Tracker Survey. 2017. InterMedia, & Bill & Melinda Gates Foundation.
- Goel, S. & Sharma, R. 2017. *Developing a financial inclusion index for India*. Procedia Computer Science, Vol.122 : 949-956.
- Gujarati, D., M. 2004. *Basic Econometrics 4th Ed*. New York : The McGraw-Hill Companies.
- Gupte, R., Venkataramani, B., & Gupta, D. 2012. *Computation of financial inclusion for India*. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol.37 : 133-149.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice 2nd Ed*. Singapur: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. 2012. Financial inclusion: Islamic perspective. *Journal of Islamic Business and Management*, Vol.2, (No.1) : 36-64.
- Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics. 2016. IFC report: measures of financial inclusion - a central bank perspective. Bank for International Settlements.
- Islamic Finance Development Report 2017 : Towards Sustainability. 2017. ICD – Thomson Reuters.
- Lebdaoui, H., & Wild, J. 2016. Islamic banking presence and economic growth in Southeast Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 9, (No. 4) : 551-569.

- Lenka, S.K., & Sharma, R. 2017. Does financial inclusion spur economic growth in India?. *The Journal of Developing Areas*, Vol.51, (No.3) : 216-228.
- Lipsey, Richard.G., Steiner, Peter.O., & Purvis, Douglas.D. 1992. *Pengantar Makroekonomi*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N.Gregory., Quah, E., & Wilson, P. 2014. *Pengantar Ekonomi Makro: Edisi Asia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mohd. Yusof, R., & Bahlous, M. 2013. Islamic banking and economic growth in GCC & East Asia countries: a panel cointegration analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.4, (No.2) : 151-172.
- Mohieldin, M. 2012. Realizing the Potential of Islamic Finance. *World Bank Economic Premise*, (No.77) : 1-7.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Roston, A., & Fu, X. The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries. *Policy Research Working Paper*, (No.5920) : 1-59.
- Naceur, S., Barajas, A., & Massara, A. 2015. Can Islamic banking increase financial inclusion?, *IMF Working Paper*, Vol.15, (No.31) : 2-41.
- Obaidullah, M. 2005. *Islamic Financial Services*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Okoye, L.U., Adetiloye, K.A., Erin, O., & Modebe, N.J. 2017. Financial inclusion as a strategy for enhanced economic growth and development. *Journal of Internet Banking and Commerce*. Vol.22, (No.S8) : 2-14.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Tentang Syariah*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Keuangan-Syariah.aspx> diakses 7 Agustus 2018.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 2016. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 2010. *Muslim Population of Indonesia*. <https://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/> diakses 1 Agustus 2018.
- Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Mitra, S., Kyobe, A., Mooi, Y.N., & Yousefi, S.R. 2015. Financial inclusion: can it meet multiple macroeconomic goals?. *IMF Staff Discussion Note*, (No.15/17) : 1-33.
- Samuelson, Paul, A & Nordhaus, William D. 2005. *Economics* 18th Ed., Int. Ed. New York: McGraw-Hill.
- Sanjaya, I Made, & Nursechafia. 2016. Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18, (No. 3) : 282-306.
- Sarma, M. 2008. Index of financial inclusion. *ICRIER Working Paper*, (No.215) : 1-20.
- Sarma, M. 2012. Index of financial inclusion - a measure of financial sector inclusiveness. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, (No.7) : 1-34.
- Sarma, M. 2016. Measuring Financial Inclusion for Asian Economies. Dalam Gopalan, S. & Kikuchi, T. (Eds.), *Financial Inclusion in Asia: Issues and Policy Concerns*. London: Palgrave Mcmillan UK.
- Syafi'i Antonio, M. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Todaro, Michael.P., & Smith, Stephen C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Umar, A.I. 2017. Index of syariah financial inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol.20, (No.1) : 100-126.

- Usmani, M., T. 2000. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Arham Shamsi.
- Vernandos, A., M. 2005. *Islamic Banking & Finance in South-East Asia: its Development & Futures*. Singapur : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- World Bank. 2014. *Global Financial Report 2014: Financial Inclusion*.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16238> diunduh pada 20 Desember 2017.
- World Bank. 2018. *Islamic Finance*. World Bank.
<http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance>
diakses pada 8 Agustus 2018.
- Yusof, Mohd.R., & Bahlous, M. 2013. Islamic banking and economic growth in GCC & East Asia countries: a panel cointegration analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.4, (No.2) : 151-172.

